



MEMBEDAH KEBIJAKAN VISI GUBERNUR RIAU



**Afrinaldy Rustam, S.Ip., M.SI
Sudianto, S.Sos., M.I.Kom
Ahmad Fauzi, S.HI.MA**

2020

Kata Pengantar Dr. Machasin M.SI (Pakar Sumber Daya Manusia)

MEMBEDAH KEBIJAKAN VISI GUBERNUR RIAU

Afrinaldy Rustam, S.Ip., M.Si
Sudianto, S.Sos., M.I.Kom
Ahmad Fauzi, S.HI.MA

Kata Pengantar Dr. Machasin M.SI
(Pakar Sumber Daya Manusia)

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

MEMBEDAH KEBIJAKAN VISI GUBERNUR RIAU

MEMBEDAH KEBIJAKAN VISI GUBERNUR RIAU

Penulis :

- Afrinaldy Rustam, S.Ip., M.Si
- Sudianto, S.Sos., M.I.Kom
- Ahmad Fauzi, S.HI.MA

Editor : Afrinaldy Rustam, S.Ip., M.Si

Tata Letak/Cover : Andik/Dewi

ISBN : 978-602-6302-81-6

Cetakan Pertama, 2020

Penerbit :

Asa Riau (CV. Asa Riau)

Anggota IKAPI

Jl. Kapas No. 16 Rejosari,

Kode Pos 28281 Pekanbaru – Riau

e-mail : asa.riau@yahoo.com

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

RIAU NEGERI PARA PENDAHULU

Bagi penulis kalimat diatas mengandung maksud bahwa provinsi ini terwujud atas jasa para pengagas, pendiri dan direalisasikan semuanya oleh pemimpin yang memimpin dalam waktu tertentu dan telah diatur dalam Undang- Undang untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Pasca otonomi daerah pada 1 Januari 2000, maka Provinsi Riau berkesempatan mengurus diri sendiri oleh pemimpin yang pilih sendiri. Muncul nama Saleh Djasid.

Mantan Bupati Kampar Ini berhasil menorehkan rasa percaya diri anak negeri bahwa mereka mampu memimpin dan berbuat untuk kejayaan Negeri yang bersinggungan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia. Pak Saleh bersama Konsorsium Town Land dari Hongkong bekerjasama PT. CPI berhasil membuat Visi Riau yakni mewujudkan Provinsi Riau menjadi pusat ekonomi dan budaya melayu tahun 2020.

Buktinya berduyun-duyun orang hebat datang ke Riau. mulai dari Bimasakti dan Hendro Kartiko yang bergabung dengan skuad PSPS Pekanbaru hingga Muda belia melanjutkan studi Ke Malaysia, Inggris dan Negara Skandinavia yang lebih maju peradabannya. Upaya ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan agar Riau sejajar dengan Negeri-Negeri maju yang ada di dunia ini.

Zaman Rusli Zainal dengan nama populer RZ muncul istilah memberantas kemiskinan dan kebodohan dengan membuka isolasi daerah karena RZ sangat intens dan dekat dengan dunia melayu islam ketika itu. Apalagi dengan, walikota malaka Datuk Muhammad Rustam dan kepusat

RZ berhasil membawa Riau menjadi tuan rumah PON tahun 2014 yang membuat rasa percaya diri semakin tinggi bahwa bisa semakin dikenal secara nasional.

Selanjutnya Anas Makmun anak daerah mampu berkiprah di Level Provinsi tapi Annas tidak lama memimpin lalu diganti dengan wakilnya yakni Arsyad Juliandi Rahman. Arsyad Juliandi Rahman yang menjadikan Riau Tanah Melayu.

Berbekal dengan menjadi orang No 1 dan kenyang dengan menjadi Ketua Umum Kadin wilayah riau dan anggota DPR RI maka Andi Rahman menancapkan Visi dan Misi yang cemerlang. Visi itu ada yang berhasil dan ada yang gagal. Gagal menang di Pilgubri ketika itu maka Andi lebih Memilih ke DPRRI dan posisinya digantikan Wan Thamrin Hasyim.

Saat Wan Tamrin menjadi Orang no 1 di Riau. Mantan Bupati Rokan Hilir ini terobsesi untuk mendukung transisi kepemimpinan Gubernur Baru dengan meninggalkan hasil Pembangunan yakni Jembatan Siak IV yang berada di Jl. Sudirman Ujung dan Flay Over yang dibuat di SKA maupun pembangunan di sektor yang lain.

Selanjutnya, teraju kepemimpinan Riau dipimpin oleh H Syamsuar M.SI dengan wakil gubernur Edi Natar Nasution yang dilantik oleh Jokowi 20 Februari 2018. Sekarang sudah 2 tahun menjabat sebagai orang no 1 di Riau. Semoga diakhir kepemimpinannya meninggalkan karya bagi kemajuan masyarakat Provinsi Riau,

Assalamualaikum Wr. Wb

Buluhcina, 05 Mei 2020
Afrinaldy Rustam ,
Sudianto,
Ahmad Fauzi

PENGANTAR OLEH DR. MACHASIN, M.SI



Government Relations merupakan sebuah buku Karya Afrinaldy Rustam, Sudioanto dan Ahmad Fauzi yang menggambarkan Visi Misi Provinsi Riau mulai dari Kepemimpinan Gubernur Saleh Djasit, Gubernur Rusli Zainal, Gubernur Anas Maamun, Gubernur Arsyad Juliadi Rahman, Gubernur Wan Thamrin Hasyim hingga Gubernur Saat Ini Syamsuar. sehingga pembaca bisa menyimak secara gamblang tentang strategi masing-masing periode kepemimpinan gubernur terpilih dalam upaya memajukan masyarakat Riau.

Buku ini ditulis dengan bahasa yang dapat menggugah rasa keingintahuan pembaca, serta dapat diterima oleh masyarakat Provinsi Riau. Buku ini layak untuk dibaca para mahasiswa yang sedang mempelajari teori tentang kebijakan publik, disamping itu juga layak dibaca para Akademisi, Peneliti dan Partisipan yang tertarik untuk mempelajari kebijakan publik.

Buku ini disamping mengupas berbagai aspek teoritis tentang dinamika kebijakan publik juga sekaligus mengungkap pernyataan Visi dan Misi dari Gubernur Riau

Era Otonomi Daerah. Dengan demikian diharapkan terbitnya buku ini di sambut baik oleh berbagai kalangan dan kolega yang melibatkan Akademisi, Professional, Budayawan-Sastrawan dan Aktivistis di Provinsi Riau. Gagasan-gagasan akademik, dan pemikiran-pemikiran kreatif solutif yang terhimpun dalam buku ini diharapkan mampu membawa Provinsi Riau menjadi Provinsi terkemuka di Indonesia.

Semoga buku ini dapat memberikan kemanfaatan bagi para pembaca dan menjadi sumber acuan literatur dalam upaya menciptakan birokrat yang unggul, profesional dan berintegritas.

Pekanbaru, 06 Juli 2020

Dr. Machasin, M.Si
Pakar Sumber Daya Manusia Riau dan Dosen pada Fakultas
Ekonomi & Bisnis Universitas Riau

DAFTAR ISI

RIAU NEGERI PARA PENDAHULUAN.....	v
PENGANTAR OLEH DR.MACHASIN,M.SI	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Government Relations	3
1.3 Visi Kepala Daerah	4
BAB II MAKNA VISI	
1.1 Kebijakan Publik.....	11
1.2 Implementasi Kebijakan	17
1.3 Pernyataan dan Tindakan	24
1.4 Penyusunan Tujuan dan Motivasi	27
1.5 Desain Komunikasi dan Mentoring.....	28
BAB III RIAU SEBAGAI PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU	
3.1 Kebudayaan Manusia	53
1.2 Skenario Masa Depan	58
1.3 Pandangan dan Harapan	64
1.4 Pemahaman Kebudayaan	69

BAB IV IMPLEMENTASI VISI MISI RIAU DARI
GUBERNUR SALEH HINGGA SYAMSUAR

1. Gubernur Saleh Djasit.....	73
2. Gubernur Rusli Zainal	79
3. Gubernur Riau Anas Maamun	88
4. Gubernur Riau Arsyad Juliadi Rahman.....	92
5. Gubernur Wan Thamrin Hasyim.....	103
6. Gubernur Riau di Era Syamsuar dan Edi Natar Nasution	104
DAFTAR PUSTAKA.....	136

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di Indonesia banyak organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah yang sudah memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat. Interaksi ini dalam bentuk nyata dikemas dalam konteks komunikasi politik. Komunikasi publik dalam perspektif administrasi merupakan interaksi antara organisasi pemerintah, kelompok masyarakat, anggota masyarakat, dunia usaha, dan organisasi internasional yang bersilat umum, terbuka. Bagi organisasi pemerintah, interaksi yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung akan menghasilkan persepsi publik. Selanjutnya, persepsi publik yang terakumulasi akan menghasilkan suatu konstruksi citra bagi organisasi pemerintah. Citra organisasi pemerintah dalam jangka waktu yang lama akan membentuk sebuah reputasi. Konsepsi mengenai citra dan reputasi organisasi dipahami dalam berbagai macam pengertian oleh berbagai disiplin ilmu. Beberapa ilmuwan menggunakan terminologi citra dan reputasi secara berganti (barnett, jermier & lafferty, 2006; Rho, Yun & lee, 2015) Sementara dalam disiplin hubungan masyarakat dan komunikasi misalnya, citra organisasi

merupakan tampilan atau image dari persepsi pihak eksternal yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lain. Mendukung pengertian ini, Dutton (1994) mendefinisikan citra organisasi sebagai pemahaman, perilaku, pengetahuan dan opini dari pihak eksternal sebagai implikasi dari strategi komunikasi. Dalam perspektif waktu, Gioia et al (2010) memandang citra sebagai gambaran organisasi yang diperoleh dalam waktu yang relatif singkat. Di lain sisi, reputasi dianggap sebagai akumulasi dari citra organisasi yang sudah berproses dalam waktu yang relatif lama (Carpenter & Krause, 2012). Reputasi dalam sektor publik menunjukkan bahwa reputasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Dalam perspektif politik dan administrasi, birokrasi yang independen dan otonomilah yang mampu menghadapi tekanan kinerja organisasi. Dalam perspektif politik dan administrasi, birokrasi yang independen dan otonomi mampu menghadapi tekanan politis dalam aktivitas kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Konspeksi mengenai otonomi, akuntabilitas, otoritas regulasi sangat berhubungan erat dengan reputasi yang berpengaruh pada kinerja. (Busuioc, 2016; Busuioc & Lodge, 2015; Carpenter, 2010b; Gilad, Maor, & Bloom, 2015; Maor, 2011). Dalam era digital seperti sekarang ini, citra dan reputasi organisasi publik juga dipengaruhi oleh mekanisme dan pola komunikasi publik yang dilakukan.

Media sosial adalah salah satu saluran komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat dengan fasilitas yang cepat, mudah, dan biaya yang relatif murah. Meskipun komunikasi model ini hanya menjangkau masyarakat yang melek terhadap internet saja, namun kemudahan interaksi dan kecepatan penyebaran informasi menyebabkan opini publik kepada seluruh lapisan masyarakat. Manajemen reputasi berbasis media sosial dapat menjadi pisau bermata dua dalam pengelolaan opini publik. Semakin positif opini yang terbentuk, semakin bagus citra dan reputasi organisasi pemerintah. Sebaliknya, semakin negatif opini publik semakin buruk citra dan reputasi pemerintah.

1.2 Government Relations

Government Relations memiliki posisi yang penting bagi perusahaan. Arti penting Government Relation adalah menciptakan keselarasan antara berbagai kebijakan pemerintah dengan perusahaan (investasi, kerja sama dagang, pajak dll, memberikan jaminan perlindungan disaat krisis dan mempercepat proses birokrasi atas berbagai kepentingan perusahaan. Hubungan dengan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kegiatan lobi dan negoisasi dengan pemerintah. Lobby merupakan kegiatan yang dilakukan secara informal untuk mendekati pemerintah sedangkan negoisasi merupakan kegiatan perundingan. Dalam berhubungan dengan pemerintah perlu mengadakan dua pendekatan yaitu secara resmi maupun tidak resmi. Lobby-lobby dalam

Government Relation dalam dilakukan dalam bentuk

1. Lobby langsung (konvensional)

Contoh: Mengadakan Pertemuan Langsung dengan pemerintah

2. Grass Roots Lobbying

Artinya melibatkan masyarakat atau massa untuk melakukan proses lobbying, contoh: Memberikan argumen atau pengertian kepada pemerintah bahwa perusahaan ini memiliki hubungan atau kepentingan dengan publik/masyarakat

3. Political Action Committees (PACs)

Artinya melibatkan masyarakat atau massa namun dengan konsep yang formal dan adanya kemungkinan unsur politik.

1.3 Visi Kepala Daerah

Visi Riau sesuai dengan Peraturan Daerah yang disingkat dengan (Perda) Provinsi Riau No.36 tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi tahun 2001 hingga 2020 yakni Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis, Sejahtera Lahir Dan Bathin Di Asia Tenggara Tahun 2020.

Untuk memberikan gambaran atas penjabaran Visi Riau 2020, telah dirumuskan ke dalam visi antara dalam visi 5 tahunan agar setiap tahap periode pembangunan

jangka menengah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kondisi, kemampuan dan harapan yang ditetapkan berdasarkan ukuran-ukuran kinerja pembangunan. Untuk itu, sesuai dengan Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah dan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau tahun 2004-2008, guna mewujudkan visi Pembangunan Riau 2020 secara berkelanjutan dan konsisten, maka dirumuskan visi Antara Provinsi Riau yakni: Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mengentaskan kemiskinan, pembangunan pendidikan yang menjamin kehidupan masyarakat agamis dan kemudahan aksesibilitas, dan pengembangan kebudayaan yang menempatkan kebudayaan Melayu secara proporsional dalam kerangka kebudayaan.

Visi Riau 2020 pernah diperdebatkan oleh Lembaga Pertahanan dan keamanan Nasional yang disingkat LEMHANAS karena lembaga tersebut beranggapan visi tersebut telah keluar dari bingkai NKRI. Padahal, Visi Riau 2020 sama sekali tidak bertentangan dengan semangat dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika makmur dan sejahtera (Riau Pos, 4 -11-2011). Karena itu Visi Riau 2020 ini perlu didukung secara serius dan sungguh-sungguh semua elemen masyarakat tanpa pandang bulu. salah satu tolok ukur penting dari tercapainya Visi Riau 2020 adalah terciptanya masyarakat yang agamis

sejahtera lahir bathin di kawasan Asia Tenggara Tahun 2020. Masyarakat yang agamis adalah masyarakat yang melaksanakan ajaran agama yang dianutnya secara totalitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Hal ini sangat bersesuaian dengan dasar negara Pancasila dengan sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu setiap penganut agama wajib menjalankan ajaran agama sesuai dengan agama yang diyakini masing-masing warga negara Indonesia. (Dahril, 2011).

Nilai-nilai agama yang universal, nilai-nilai budaya yang kental dan memiliki banyak unsur kebersamaan sudah memainkan peran penting dalam memelihara kerukunan antar umat dan masyarakat Riau. Karenanya peran ini harus dapat ditingkatkan, dikokohkan serta dikekalkan termasuk, dalam setiap upaya pencapaian Visi Riau 2020. Selama ini peran masyarakat agamis di Riau belum nampak menonjol dalam mendukung Visi Riau 2020 atau masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencapaiannya bukanlah bermakna mereka tidak mendukung atau menolak, tetapi tentulah ada sebab musababnya atau ada permasalahan yang belum dikaji dan diatasi (Tennas, 2011,1).

Secara umum penyebabnya dapat dilihat dan dirasakan dari sisi kurangnya sosialisasi Visi Riau 2020 ke tengah-tengah masyarakat atau kurangnya melibatkan anggota masyarakat atau kurangnya pemahaman

masyarakat terhadap makna, isi dan inti serta faedah dan manfaat dari pencapaian Visi dimaksud.

“Apabila niat hendak tercapai.

jelaskan maksudnya ke orang ramai,

supaya yang baik boleh dipakai,

supaya yang tak faham menjadi pandai”

atau dikatakan

“Kalau hendak didukung orang,

jelaskan maksudnya berterus terang supaya yang gelap jadi benderang.

supaya tahu lebih dan kurang (Tunjuk Ajar Melayu, Tenas Effendy, 2004)

Dalam era globalisasi serta kemajuan sains dan teknologi, ancaman terhadap kebudayaan semakin hari semakin meningkat. Banyak sudah nilai-nilai asas budaya bangsa yang terkikis, terpasung bahkan ditinggalkan. Kian hari kian banyak budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa umumnya, masuk dan mempengaruhi serta membawa kerusakan terhadap kehidupan dan prilaku masyarakat.

Karenanya, Visi Riau 2020 perlu diwujudkan dengan realistis yang diharapkan dapat membendung dan menghadapi tantangan budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat agamis. Sebaliknya, melalui Visi 2020 dapat pula diserap nilai-nilai budaya

luar yang positif dan bermanfaat, untuk memperkaya dan menumbuhkan kembangkan budaya bangsa umum, budaya Melayu khususnya. Sebab budaya Melayu adalah budaya terbuka yang tidak menutup diri terhadap nilai-nilai budaya luar, sepanjang membawa kebaikan dan faedah bagi masyarakat.

Oleh karena itu, keterikatan antara publik relation dengan Visi Riau 2020 adalah keduanya saling membutuhkan satu dengan yang lain dimana publik relation dilaksanakan oleh pihak perusahaan dimana bermitra dengan pemerintah selaku pemegang keputusan. Sedangkan bagi pemerintah Visi Riau 2020 merupakan publik relation mereka yang tersosialisasi secara sadar maupun tidak sadar kepada semua element masarakat termasuk dunia usaha. jadi hubungannya adalah win win solution yakni saling membutuhkan satu dengan yang lain sehingga apabila tidak ada kebijakan kolektif dari pemerintah dalam hal ini Gubernur Riau bersama organisasi perangkat daerah yang didukung oleh dunia usaha maka Visi Riau 2020 itu tidak dapat terwujud.

Buku ini mengulas Implementasi Visi Riau 2020 yang dimulai dari

1. Gubernur Riau di era Saleh Djasit
2. Gubernur Riau di era Rusli zainal
3. Gubernur Riau di era Anas Ma'mun
4. Gubernur Riau di era Andi Rahman
5. Gubernur Riau di era Wan Tamrin Hasyim
6. Gubernur Riau di Era Syamsuar dan Edi Natar

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah keputusan autoritatif, keputusan yang dibuat oleh orang yang memegang kekuasaan, formal atau informal. Sedangkan kebijakan publik adalah sekelompok orang yang dihubungkan dengan isu khusus. Publik adalah lingkungan dimana orang menjadi warga negara, ruang dimana warga negara berinteraksi, dimana negara dan masyarakat berada. maka kebijakan publik adalah negara atau pemerintah sebagai pemegang kekuasaan keputusan untuk mengatur kehidupan publik untuk mencapai misi bangsa. (Rian Tnugroho, 2014:32)

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus administrasi publik, dimana kebijakan publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Kemudian kebijakan publik juga merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. (Chandler dan Plano dalam Harbani

Pasolong, 2010:38-39).

Menurut Thomas R. dye Kebijakan adalah “whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan). Dari pengertian ini maka pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya pada apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

Dengan tidak dilakukan oleh pemerintah itu mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dapat dibayangkan betapa besar pengaruhnya terhadap masyarakat jika pemerintah mendiamkan atau tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap kejahatan yang semakin merajalela dalam masyarakat, dengan demikian tindakan tidak melakukan apa-apa merupakan kebijakan yang diambil pemerintah. (Miftha thoha, 2003:62-63)

Secara etimologis istilah kebijakan berasal dari Bahasa Yunani, Sunsekerta yaitu polis (Negara-kota) dan dikembangkan dalam bahasa latin menjadi politician (Negara) dan akhirnya dalam bahasa inggris yaitu police yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintah (Dunn dalam Sahaya Anggara, 2012:51-52)

Kebijakan (Police) adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan

tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik. (Edi Suharto,2013:3) Kebijakan publik menitik beratkan pada publik dan problem-problemnya.

Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan publik disusun dan didefinisikan serta bagaimana kesemua itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik (Jhon Dewey dalam Wicaksono, 2006:63).

Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber- sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijaksanaan Negara bersumber pada kenyataan bahwa kebijaksanaan itu dirumuskan oleh apa yang David Easton sebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam system politik yakni para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator dan lain sebagainya. Mereka inilah yang menurut Easton merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik dari system politik dan dianggap oleh sebagian besar warga system politik itu sebagai pihak yang bertanggungjawab atas urusan-urusan politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu sepanjang tindakan-tindakan tersebut masih berada dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka. (Solichin abdul wahab, 2005:5)

Berikut ciri-ciri kebijakan publik:

1. Kebijakan Negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.
2. Kebijaksanaan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijaksanaan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dan bukan hanya apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam bidang tertentu.
4. Kebijaksanaan Negara mungkin berbentuk positif mungkin pula negatife. (solichin abdul wahab, 2005: 6-7)

2.1.3 Tahap-tahap Dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan yang bertanggung jawab adalah proses yang melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuaan, pemimpin-pemimpin organisasi profesional, para administrator dan para politisi.(K. Price dalam Wahab 2012:72)

Di samping itu proses pembuat kebijakan memerlukan tanggung jawab yang tinggi dan suatu kemauan untuk mengambil inisiatif dan resiko, oleh karena itu banyak ahli politik membagi proses penyusunan kebijakan ke dalam beberapa tahap di antaranya:

1. Penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali sementara lainnya ditunda untuk waktu yang lama.

2. Formulasi kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan pengadilan dan tindakan legislatif.

3. Adopsi kebijakan

Alematife kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatife, konsensus diantara direktur lembaga atau keputusan produksi.

4. Implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilitasasi sumber daya financial dan manusia.

5. Penilaian kebijakan

Unit-unit pemeriksaandanakuntansidalampemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatife fan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan dan pencapaian tujuan. (William N. Dunn 2000:24).

2.1.4 Aktor dan Pelaku Pembuat Kebijakan Publik

Pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik, walau dalam kenyataannya beberapa orang mempunyai wewenang yang sah untuk bertindak dikendalikan oleh orang lain.

Dalam konteks ini sangat penting membedakan anatar pembuat kebijakan primer dan pembuat kebijakan sekunder/pendukung. Pembuat keputusan primer adalah faktor-faktor atau stakeholder yang mempunyai wewenang konstitusional langsung untuk bertindak. Sedangkan pembuat kebijakan sekunder/pendukung yaitu seperti instansi administrasi, harus mendapatkan wewenang untuk bertindak dari lembaga yang lainnya (pembuat kebijakan primer) dan karena itu paling tidak secara potensial, ia tergantung atau dapat dikendalikan oleh mereka (pembuat kebijakan primer). Pembuat kebijakan antara lain:

1. Legislatif

Tugas dari legislatif adalah yang berhubungan dengan tugas politik sentral dalam suatu sistem politik. Penetapan keputusan politik menjadi kebijakan publik merupakan sesuatu yang harus ditentukan melalui rangkaian kegiatan empiris yang runut dan sistematis.

2. Eksekutif

Banyak yang mengatakan bahwa saat ini kita hidup didalam sebuah era yang disebut dengan “executive-center era” dimana efektifitas pemerintah selaku

lembaga eksekutif secara substansial tergantung pada kepemimpinan eksekutif baik dalam pembentukan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Instansi Administratif

Sistem administrasi di seluruh dunia dibedakan berdasarkan karakteristiknya, seperti ukuran dan keragaman, hierarkisitas organisasi, hingga tingkat otonominya. Meskipun terdapat satu doktrin umum dalam ilmu politik instansi administrasi hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah, namun saat ini diakui bahwa politik dan administrasi dapat berbaur dan instansi administrasi sering terlibat dalam pengembangan kebijakan publik

4. Lembaga Peradilan

Pengadilan atau lembaga peradilan yang notabennya berwenang dalam proses banding seringkali dipengaruhi oleh sifat dan isi kebijakan publik melalui penggunaan kekuasaan pengadilan untuk menginterpretasikan undang-undang dalam kasus yang dibuat sebelumnya. (Leo Agustino, 2014: 29-34).

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. (Grindle dalam Harbani Pasolong, 2010:57-58). Implementasi merupakan

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi. (Leo Agustino. 2014:138-139).

2.2.2 Pemahaman Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh orang pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan menurut Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Proses Kebijakan Publik* menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut: "Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan" (Winarno, 2005:101).

Berdasarkan definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Pendapat Budi Winarno tersebut sejalan dengan pendapat Riant Nugroho dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi yang mengemukakan bahwa “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut” (Nugroho, 2004:158).

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut melalui bentuk program-program serta melalui derivat. Derivat atau turunan dari kebijakan dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan publik yang intervensi. Pengertian implementasi kebijakan menurut Dwiyanto Indiahono dalam bukunya Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis sebagai berikut: Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. outcome adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau waktu yang

lama pasca implementasi kebijakan” (Indiahono, 2009:143).

Perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Dari titik ini kemudian keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja performance). Perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. (van Meter dan Van Horn, dalam Solihin Abdul Wahab, 2012:164).

2.2.3 Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi George C. Edward III (1980:01) secara bottom-topper atau berpola dari bawah ke atas. Selanjutnya George C. Edward III mengemukakan beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Dalam keempat variabel tersebut terdapat hubungan antara satu dengan yang lain

1. Komunikasi.

Komunikasi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan publik dalam mencapai tujuan. Komunikasi sangat diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan

yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat 3 indikator dalam mengukur keberhasilan komunikasi yaitu:

1. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik.
2. Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.
3. Konsisten, yaitu pemerintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau tidak suatu kebijakan itu sendiri, karena jika perintah yang diberikan berubah-ubah maka akan membingungkan masyarakat.

2. Sumber daya.

Sumber daya merupakan suatu hal sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik, adapun indikator dari sumberdaya, ialah:

1. Staf, sumber daya utama dalam implementasi sebuah kebijakan. Kegagalan yang terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya di bagian staf yang dikarenakan staf tidak mencukupi, tidak memahami, tidak memadai, ataupun tidak berkompeten dibidangnya.
2. Informasi, informasi terdiri dari dua bentuk, yaitu: satu informasi yang berhubungan dengan

cara melaksanakan kebijakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan

3. Wewenang, pada umumnya kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementator dimana publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menyebabkan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan
4. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementormungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas yang mendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan. Jika pelaksana kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Adapun indikator dari disposisi adalah:

1. Pengangkatan birokrasi, disposisi atau sikap para

pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Oleh karena itu pemilihan dan pengangkatan pesonil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana lebih kepada kepentingan warganya.

2. Insentif pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan jadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dikarenakan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok.

4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan telah tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksanan atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi

Birokrasi sebagai pelakasana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan

baik. Menurut Edward III ada dua karakteristik untuk menjadikan birokrasi lebih baik, yaitu:

1. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga)
2. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan- kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja.

2.3 Pernyataan dan Tindakan

Sebagaimana disinggung di muka bahwa pemimpin hendaklah dapat melihat jauh permasalahan-permasalahan dan rencana-rencana yang berhubungan langsung dengan organisasinya untuk menentukan arah perkembangan organisasi dan para anggotanya kelak. Ketika orang lain melihat sesuatu sebagai batu maka seorang pemimpin hendaklah melihatnya sebagai bagian dari sebuah bangunan. Ketika orang lain melihat sebagai sebuah langit biru, seorang pemimpin hendaklah melihatnya sebagai sebuah rencana. Ilustrasi tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah visi. Menurut wigget, Tugas seorang pemimpin adalah bagaimana Robert L. menciptakan sebuah Pemimpin-pemimpin menunjukkan visi dari organisasinya. Suatu pernyataan visi dapat menjadi sebuah filosofi yang dalam.

Tetapi, visi biasanya baru bermakna bila diaplikasikan pada organisasi. Sebuah visi adalah pernyataan yang secara relatif mendeskripsikan aspirasi sebuah atau arahan untuk masa depan organisasi. Agar diterima di dalam organisasi, pernyataan visi harus berbeda secara jelas dari status. Dengan kata lain, sebuah pernyataan visi harus dapat menarik perhatian, tetapi tidak menimbulkan salah pemikiran. Singkatnya, visi harus menular bagi semua atau sebagian besar anggota dalam sebuah kelompok. Pernyataan tentang sebuah visi dapat diterima bila para pemimpin memiliki pandangan yang lebih tinggi dan pengukuran yang tidak konvensional untuk mendukung visi tersebut. Menurut David E. Berlew, seorang pemimpin harus dapat mengkomunikasikan visi dengan mengajak dan membuat tertarik para anggota organisasi. Para pemimpin harus berani menantang status quo dengan aksi yang menantang status quo tersebut Pemimpin yang mendukung pernyataan visinya bangunan organisasi dan para anggotanya kelak. Ketika orang lain melihat sesuatu sebagai batu maka seorang pemimpin hendaklah melihatnya sebagai bagian dari sebuah bangunan. Ketika orang lain melihat sebagai sebuah langit biru, seorang pemimpin hendaklah melihatnya sebagai sebuah rencana. Ilustrasi tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah visi. Menurut wigget, Tugas seorang pemimpin adalah bagaimana Robert L. menciptakan sebuah Pemimpin-pemimpin menunjukkan visi dari organisasinya. Suatu pernyataan visi dapat menjadi sebuah filosofi yang dalam.

Tetapi, visi biasanya baru bermakna bila diaplikasikan pada organisasi. Sebuah visi adalah pernyataan yang secara

relatif mendeskripsikan aspirasi sebuah atau arahan untuk masa depan organisasi. Agar diterima di dalam organisasi, pernyataan visi harus berbeda secara jelas dari status. Dengan kata lain, sebuah pernyataan visi harus dapat menarik perhatian, tetapi tidak menimbulkan salah pemikiran. Singkatnya, visi harus menular bagi semua atau sebagian besar anggota dalam sebuah kelompok. Pernyataan tentang sebuah visi dapat diterima bila para pemimpin memiliki pandangan yang lebih tinggi dan pengukuran yang tidak konvensional untuk mendukung visi tersebut. Menurut David E. Berlew, seorang pemimpin harus dapat mengkomunikasikan visi dengan mengajak dan membuat tertarik para anggota organisasi. Para pemimpin harus berani menantang status quo dengan aksi yang menantang status quo tersebut. Pemimpin yang mendukung pernyataan visinya dengan risiko penderitaan, memiliki peluang untuk diterima para pengikutnya. Apalagi pemimpin yang menunjukkannya dalam tindakan-tindakan, sangat memungkinkan para pengikut untuk menggunakan pernyataan visi ini. Socrates, menyatakan "Kenali orang yang bijaksana dengan mengetahui cara hidupnya. Menurut John Gardner, terdapat empat kriteria pemimpin dan pernyataan visinya dapat dievaluasi, seperti berikut.

- Apakah mereka menyadari potensi manusia?
- Apakah mereka menyeimbangkan kebutuhan individual dan kelompok?
- Apakah mereka mempertahankan nilai-nilai dasar dari suatu kelompok?
- Apakah mereka mengajarkan rasa inisiatif dan tanggung jawab individual?

Pernyataan pemimpin yang bertentangan dengan satu atau lebih kriteria ini, menurut Gardner merupakan bentuk dari kegagalan pemimpin tersebut. Dengan kata lain, pemimpin tidak cukup hanya mencetuskan pernyataan tentang visi, tetapi para pengikut harus mengikuti dengan antusias dan menerimanya sebagai bagian dari budaya organisasi. Dengan memberitahu dan membagi serta berdiskusi tentang visi, seorang pemimpin dapat menjadi imbol dari visi itu sendiri. Dengan demikian, para pemimpin haruslah bertindak sesuai visi yang ditunjukkan bagi organisasinya. Visi lebih tergantung pada aspirasi yang berupa raktik daripada inspirasi yang tidak jelas, tempatkanlah pernyataan visi tersebut di luar status quo, tetapi tidak terlalu jauh sehingga dapat menyebabkan kehilangan kredibilitas. Dukunglah semua keinginan dengan tindakan-tindakan yang nyata.

2.4. Penyusunan Tujuan Dan Motivasi

Penyusunan tujuan. Agar visi sesuai dengan tujuan organisasi di masa mendatang, para pemimpin harus menyusun dan menafsirkan tujuan-tujuan bagi individu dan unit-unit kerja. Hal ini dapat menjadi sama luasnya dengan hasil target cara keseluruhan atau sama istimewanya dengan Management (tujuan kinerja yang disetujui oleh yang berada di atasnya dan di bawahnya). Dalam sistem MBO, tujuan-tujuan yang ingin dikerjakan mengacu 5 faktor berikut. Apa yang ingin dikerjakan organisasi?

Dengan batasan apa (termasuk waktu, kualitas, sumber daya, dan lain-lain pekerjaan tersebut harus diselesaikan?

Sumber-sumber daya apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? model yang dipilih para pemimpin, nelukiskan sebuah kelompok pekerja yang ingin memusatkan usaha mereka yada tugas-tugas pekerjaan, dan akhirnya penghargaan akan datang. Dalam kaitan ini, para pemimpin haruslah menjaga kekuatan motivasi ara pekerja dengan tetap menjaga dan memberikan penghargaan yang harapkan da- pat dicapai. Saran Kepemimpinan

- Susunlah dan tafsirkanlah tujuan-tujuan organisasi, lalu (lebih sering dengan pemberian wewenang) diskusikanlah kinerja khusus dalam pencapaian tujuan dengan karyawan-karyawan secara personal.
- Motivasilah para karyawan dengan menggunakan pengharapan mereka sendiri terhadap pemenuhan tujuan dan penghargaan.
- Jangan beranggapan bahwa sesuatu yang dapat memotivasi seseorang juga dapat digunakan untuk memotivasi orang lain dalam suatu organisasi.

2.5 Desain Komunikasi dan Mentoring

Sekarang ini, sebenarnya yang dikatakan karyawan suatu perusahaan atau organisasi itu hanya 20% saja, 80% lainnya adalah supplier, tenaga kontrak, tenaga paruh waktu, dan tenaga-tenaga konsultan. Jadi, makin lama pengertian perusahaan menjadi suatu kumpulan orang-orang kontrak, bukan lagi suatu rumah masa depan para karyawan.

Pada pertengahan tahun 1980-an Sun Microsystem, Inc yang sekarang pabriknya tersebar di 27 negara dengan jumlah karyawan 14.000 orang mempersingkat komunikasi internal maupun eksternal melalui cara yang disebut paper- bound communication. Di bawah CEO Scott McNealy, perusahaan ini menjadi suatu paperless organization di mana semua komunikasi dan transaksi dilakukan secara maya atau menggunakan telepon dan e-mail.

Dalam perkembangannya kemudian, setiap karyawan setiap hari mengirimkan 150 e-mail dan menerima balasan sebanyak 452 e-mail. Perkembangan ini mendorong Sun mengembangkan sistem e-mail yang lebih canggih yang memungkinkan karyawan membuat daftar prioritas e-mail perkembangan ini juga memunculkan budaya pesan yang lebih singkat, padat, dan hanya dikirimkan kepada yang perlu saja.

Informasi merupakan jantung kualitas perusahaan atau organisasi, tanpa walaupun produk dan layanan pun jual perusahaan itu bagus, tetapi jika komunikasi internal dan eksternalnya tidak bagus maka perusahaan itu tidak akan bertahan lama karena tidak akan dikenal masyarakat dan reputasi di dalamnya buruk.

Informasi, dalam bentuk apapun, jika tidak dapat diterima atau ditanggapi oleh komunikannya yang ditujusercepat dapat berubah menjadi disinformasi atau bahkan disinformasi. Dalam perusahaan atau organisasi, orang yang bertanggung jawab atas lancar

tidaknya arus komunikasi adalah pimpinan. Dengan kata lain, pimpinan bertanggung jawab atas desain komunikasi dalam organisasi atau perusahaannya. Bagaimana bentuk atau lain komunikasi ke bawah, ke atas, dan ke samping harus dilakukan dan ditentukan oleh pimpinan

Bagaimana bentuk atau lain komunikasi ke bawah, ke atas, dan ke samping harus dilakukan, tentukan oleh pimpinan.

1. Desain Komunikasi

Dalam mengembangkan desain komunikasi, ada 3 hal yang dapat dijadikan pedoman, seperti berikut.

1. Tidak ada satupun informasi yang tidak dapat dikomunikasikan Bawahan yang tidak pernah menerima informasi dari atasannya tidak akan pernah berpikir bahwa memang tidak ada informasi penting yang perlu disampaikan oleh atasannya, tetapi umumnya mereka akan menganggap atasannya adalah orang tersingkir dari lingkungan perusahaan, atau orang yang tidak mengetahui kebutuhan perusahaan dan karyawan, atau orang yang tidak peduli dengan perusahaan.
2. Semakin banyak komunikasi bukan berarti semakin baik komunikasi Dalam era sekarang setiap manajer merasakan banjir kata-kata baik melalui telepon, e-mail, fax, pager, surat, memo, dan laporan. Berbagai macam informasi

atau komunikasi tersebut bagaimanapun juga membutuhkan waktu untuk mempelajarinya dan bahkan dapat menjadi sumber masalah jika informasi tersebut tidak akurat. Adalah tugas pimpinan untuk mengatur saluran-saluran informasi agar tidak mbludag dan saling tumpang tindih

3. Data bukan Informasi

Segala macam data atau fakta tidak selalu merupakan informasi, kecuali jika data tersebut betul-betul menginformasikan fakta. Dalam menyusun desain komunikasi harus dipertimbangkan faktor-faktor perlu tidaknya informasi disampaikan, kapasitas interpretasi, dan kemampuan menerima informasi dari khalayak yang ingin dituju Jenis komunikasi yang harus dikembangkan adalah

1. Komunikasi ke Atas

Komunikasi ke atas dalam organisasi bisa berbentuk struktural dan nonstruktural. Bentuk-bentuk komunikasi ke atas yang struktural, antara lain laporan-laporan (kemajuan, berkala, perjalanan, investigasi, sebagainya), survai karyawan, dan informasi-informasi yang disampaikan kepada manajemen oleh serikat pekerja. Contoh komunikasi ke atas yang nonstruktural adalah kotak saran. saluran komunikasi yang dibuat harus memung-

kinkan pimpinan mengetahui semua masalah yang ada dalam organisasinya, kemajuan kemajuan yang dicapai, kemungkinan pengembangan organisasi yang dapat dilakukan, dan kondisi semua sumber daya baik manusia maupun finansial. Saluran komunikasi yang baik juga harus memberikan kesempatan kepada semua karyawan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan mengajukan ide-ide untuk pengembangan organisasi atau perusahaan, dan memungkinkan mereka mengembangkan potensi-potensi dirinya baik potensi teknis maupun konseptual dan kepemimpinan. Meskipun demikian, formulasi ke atas yang terlalu banyak akan dapat menyebabkan setidaknya 3 hal, yaitu Pertama, waktu pimpinan yang berharga akan banyak tersita untuk mempelajari semua informasi yang masuk, yang kemungkinan justru tidak semuanya terpelajari dengan baik, padahal seorang pemimpin juga memerlukan waktu untuk refreshing agar keputusan-keputusan yang dibuatnya akurat. Kedua, kemungkinan pimpinan akan terdorong atau terjebak ke arah micro manage bahkan terhadap masalah-masalah yang sangat penting. Micromanage adalah suatu kondisi di mana pimpinan hanya ter-

paku menangani masalah-masalah kecil yang tidak substansial dan tidak mampu menangani masalah-masalah besar yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya. Ketiga, dapat menimbulkan demoralisasi karyawan karena mereka merasa sudah menyampaikan banyak informasi, sudah mengikuti banyak pelatihan dan pendidikan, tetapi tidak ada satupun tindakan atau tindak lanjut yang diambil pimpinan.

Sebagai ilustrasi, simaklah pengalaman Warren Bennis, sewaktu dia menjadi Rektor Universitas Cincinnati, Amerika Serikat. Selama 10 bulan pertama saya menjadi Rektor, setiap hari saya di kantor sampai pukul 04.00 pagi untuk membaca dan mempelajari laporan-laporan yang masuk. Sebegitupun, laporan itu belum semua terbaca; yang lama belum selesai sudah masuk yang baru susul-menyusul tiada habisnya. Belum lagi kertas-kertas yang harus saya tanda tangani, baik itu yang berhubungan dengan hal-hal dalam kurun masa jabatan saya maupun yang merupakan peninggalan dari pendahulu saya. Seluruh tulang serasa patah, mental sangat letih, dan secara tidak sadar menjadi orang yang pemarah dan mudah tersinggung. Sampai memelototi kalender dan jam dinding, dari seperempat jam satu ke

seperempat jam berikutnya untuk mengecek apa saja yang sudah dikerjakan dan apa saja yang sudah saya hasilkan, dan apa yang diperoleh. Ternyata, saya menemukan diri menjadi korban dari suatu konspirasi yang tidak disadari untuk mencegah melakukan apapun yang bakal mengubah status quo.

Ilustrasi di atas menunjukkan betapa harus kehati-hatian suatu sistem komunikasi di rancang karena sistem komunikasi yang tidak tepat akan dapat menimbulkan masalah besar yang justru dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.

2. Komunikasi ke Bawah

Kebanyakan komunikasi ke bawahan dilakukan oleh atau berasal dari atasan bahkan ada yang berpikir bahwa hanya itulah satu-satunya bentuk komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah dapat berbentuk: arahan verbal, memo, kebijakan, prosedur, materi pelatihan, tugas, evaluasi kinerja, dan majalah atau newsletter.

Atau pimpinan memang terlihat seperti penyalur atau memang komunikasi ke bawah kedudukan dan fungsinya itu memungkinkan pimpinan menginisiasi atau memerintahkan tindakan yang diperlukan. Saluran ini juga efektif untuk menyebarkan

informasi kepada seluruh karyawan dengan kemungkinan kecil terjadinya distorsi informasi.

Meskipun demikian, komunikasi ke bawah yang terlalu banyak atau tidak perlu dapat menimbulkan sindrom “selalu menunggu petunjuk dan pengarahannya” di kalangan karyawan yang pada akhirnya dapat mematikan inisiatif Karyawan yang terlalu banyak menerima informasi dari atasan juga bisa menjadi cuek dengan semua informasi yang diterimanya dari atasannya. Sindroma ini biasa disebut bulletin-board dilemma yaitu suatu kondisi di mana pesan-pesan atau kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pimpinan melalui cara apapun sama sekali tidak dipedulikan oleh karyawan, jika berbentuk tertulis tidak dibaca dan jika berbentuk verbal tidak didengarkan.

3. Komunikasi ke Samping (Komunikasi Lateral)

Persoalan lain yang juga harus diperhatikan oleh pimpinan jaman sekarang adalah komunikasi dengan para sejawat atau sesama pimpinan, yang bagaimanapun juga bukan merupakan bawahan dari pimpinan perusahaan. Komunikasi lateral ini penting dibangun untuk mengembangkan team spirit di seluruh jajaran organisasi agar tidak

terjadi persaingan yang tidak sehat di antara bagian-bagian, departemen-departemen, divisi-divisi, dan sebagainya sehingga dimungkinkan terjadi sumbang saran dan kera sama dalam pemecahan masalah yang ada. Bentuk-bentuk komunikasi lateral yang biasa dilakukan, antara lain makan siang, obrolan via telepon, tenis, golf, dan aktivitas-aktivitas lain pasca jam kantor. Meskipun demikian, komunikasi lateral yang tidak terkontrol, dapat mengakibatkan terouangnya waktu kerja karyawan karena banyak dipakai untuk melakukan komunikasi lateral dan kemungkinan terjadi tambahan atau pengurangan informasi sebagai akibat wajar dari proses komunikasi berantai.

Tidak semua informasi dapat dikomunikasikan secara lateral; informasi yang berkategori rahasia atau sangat rahasia tidak semestinya dikomunikasikan secara sembarangan dalam bentuk komunikasi lateral.

Misalnya, informasi tentang gaji seseorang, anggaran unit atau divisi, dan semacamnya adalah contoh informasi yang masuk kategori rahasia agar tidak mengganggu ketenangan kerja.

2. Monitoring

Informasi yang disebarkan harus secara terus-menerus dimonitor. Monitoring ini dimaksudkan bukan hanya untuk mengetahui pengaruhnya secara internal, tetapi juga pengaruhnya terhadap lingkungan eksternal. Pimpinan tidak dapat melakukan monitoring secara asal-asalan atau hanya mengandalkan pandangan atau pendengaran sekilas saja karena hasil monitoring yang diperoleh tidak akan menggambarkan atau menginformasikan apa-apa. Monitoring harus dirancang secara efektif dan sistematis. Seluruh proses dan prosedur yang dilakukan harus diintegrasikan ke dalam sistem yang sudah ada dalam organisasi dengan didasarkan pada asumsi-asumsi yang cermat dan cerdas.

Monitoring yang kurang cermat dan tidak akurat akan memberikan yang serius kepada organisasi atau perusahaan. Dampak yang berbahaya terutama akan terjadi jika moral pekerja atau karyawan rendah, kondisi pasar berubah, pelaksanaan proyek terlambat, biaya proyek membengkak. Jika ini terjadi maka seorang pemimpin yang baik harus segera mengambil tindakan cepat agar tidak terjadi kerugian berkepanjangan. Berikut cara-cara yang dapat dilakukan untuk melakukan monitoring internal, seperti berikut.

1. Lakukan

Survei pelanggan atau konsumen. Mintalah informasi tanggapan, dan saran pelanggan untuk perbaikan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Hormati dan hargai konsumen karena tanpa konsumen seluruh produk dan jasa yang Anda hasilkan akan sia-sia.

2. Jalin hubungan dengan para pejabat pemerintah atau instansi terkait untuk tidak ketinggalan informasi atas perubahan-perubahan kebijakan, peraturan maupun undang-undang.
3. Lakukan kontak atau komunikasi dengan para pesaing dan organisasi-organisasi atau asosiasi-asosiasi profesional.
4. Pelajari informasi yang berkembang di luar tentang organisasi atau perusahaan yang ada di majalah-majalah, buku-buku, jurnal-jurnal, koran-koran, televisi, dan sebagainya.
5. Lakukan uji sampel produk-produk perusahaan pesaing. Pelajarilah semua strategi bisnis para kompetitor, kemudian lakukan kajian untuk memenangkan persaingan.

Delegasikan kewenangan monitoring kepada para bawahan yang kompeten karena tidak semua informasi dapat dimonitor oleh pimpinan seorang diri

Kiat Membuat Desain Komunikasi dan Monitoring, sebagai berikut.

1. Luangkan waktu untuk menyusun desain komunikasi yang tepat secara rinci: saluran-saluran komunikasi mana yang dipandang terberat, saluran-saluran mana yang dipandang teringan, alasan apa yang mendasarinya, bagaimana cara mengatasinya, dan sebagainya.
2. Perluas jaringan monitoring, baik internal maupun eksternal. Gunakan semua cara yang ada, jangan hanya melalui pengamatan atau informasi verbal
3. Pisahkan antara informasi penting dengan informasi yang kurang penting, dan pastikan semua informasi benar-benar disampaikan kepada yang berhak menerimanya.

2.6. Informing, Consulting, Dan Mentoring

Berikut laporan Thomas Petzinger yang dimuat dalam *The Wall Street Journal* (5 Maret, 1966) tentang informing, consulting, dan mentoring yang ada dalam suatu perusahaan yang sedang berkembang pesat. "Di perusahaan ini, sebutlah PT X, sistemnya berjalan nyaris prima, sampai suatu saat ketika seorang supir truknya meminta seorang pesuruh untuk memasukkan barang ke dalam kotak untuk kemudian dimasukkan ke dalam

kapal. Secara tidak sengaja pesuruh tersebut memasukkan barang yang salah ke dalam kotak. Akibatnya sudah bisa diduga, konsumen yang menerima barang pesanannya menjadi sangat marah, dan yang kena marah pertama adalah bagian pelayanan konsumen (customer service). Oleh karena merasa tidak bersalah, customer service marah ke bagian pengangkutan. Bagian pengangkutan tidak bisa menerima kemarahan itu karena dia merasa tidak bersalah karena dia hanya bertugas untuk memasukkan barang ke dalam kapal, tidak bertanggung jawab atas kesesuaian isi kotak. Ilustrasi di atas menunjukkan betapa masalah menginformasikan (informing), memberikan bimbingan (consulting), dan melakukan pemantauan (monitoring) adalah peran sangat penting yang harus diemban oleh seorang pemimpin.

Haruslah diingat bahwa tidak mungkin semua karyawan Anda mengetahui secara persis apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh perusahaan Anda. Sementara perasaan menjadi bagian atau ikut memiliki perusahaan tidak akan muncul jika karyawan tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh perusahaannya dan apa yang harus dia kerjakan untuk mencapai keberhasilan bersama atau keberhasilan perusahaan. Perasaan ikut menjadi bagian atau ikut memiliki selama ini terbukti menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan yang pada akhirnya adalah tercapainya kesuksesan perusahaan.

Mengetahui atau memperoleh pemberitahuan tentang hal-hal yang dilakukan perusahaan atau organisasi

bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Faktor yang juga mempengaruhi produktivitas kerja adalah bimbingan simpatik dari atasan dan pemantauan yang kontinu atas hal-hal yang dikerjakan.

1. Informing

Menyampaikan informasi yang dimaksud di sini adalah menyampaikan dan berbagi informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan yang terdapat di lingkungan internal dan eksternal organisasi atau perusahaan kepada semua karyawan atau anggota organisasi. Banyak keuntungan yang dapat dipetik dari kegiatan informing tersebut, seperti berikut

1. Meningkatkan motivasi kerja karyawan karena mereka menyadari betapa pentingnya sumbangan mereka terhadap keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang,
2. Mempercepat penyesuaian karyawan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam perusahaan
3. Meningkatkan semangat kebersamaan dan kesadaran bahwa mereka semua merupakan bagian dari keluarga besar perusahaan,
4. Menumbuhkan kinerja yang lebih baik karena para karyawan mengetahui betul tentang posisi dan kondisi perusahaannya, cita-cita yang ingin diraih bersama, tantangan yang ada, dan

bagaimana menghadapinya. Untuk dapat memperoleh manfaat tersebut di atas, berikut beberapa langkah yang harus dipertimbangkan.

5. Bedakan cara menyampaikan informasi-informasi biasa, penting, dan sangat penting. Ada beberapa cara untuk membedakannya, antara lain dengan meletakkannya di kertas yang berbeda-beda warna, misalnya warna merah untuk informasi yang sangat penting dan bersifat rahasia, warna kuning untuk informasi yang penting dan segera, warna biru untuk informasi biasa tapi segera, dan sebagainya. Dengan cara demikian maka penerima akan segera mengetahui tingkat dan sifat informasi yang diterimanya sehingga penyebaran informasi akan berlangsung secara efektif dan efisien.
6. Sesuaikan informasi yang disampaikan dengan kebutuhan atau tugas penerima pesan. Motto yang harus diperhatikan dalam pengiriman atau penyebaran informasi adalah mudah dibaca dan dipahami (*it won't-hurt-them-to-read-it*), artinya informasi yang diberikan sedapat mungkin yang benar-benar berhubungan dengan fungsi dan tugasnya. Jangan sampai memberikan semua informasi kepada semua orang karena setiap orang memiliki keterbatasan waktu dan kemampuan dalam menerima dan memahami informasi. Misalkan

suatu perusahaan memiliki 50 eksekutif, lalu pimpinan perusahaan mengundang mereka semua dalam suatu rapat untuk membahas 10 masalah bisnis. Rapat ini akan lebih efektif apabila tidak semua eksekutif tersebut secara ber sama-sama diminta membahas 10 masalah tersebut, tetapi misalnya 50 orang eksekutif tersebut dibagi menjadi 5-10 kelompok yang relevan dan masing-masing kelompok diminta membahas 1-2 masalah secara tuntas. Kepada masing-masing kelompok diberikan informasi yang mungkin saja berbeda-beda satu sama lain.

7. Ciptakan cara yang aman agar setiap karyawan mampu memperoleh informasi yang mereka perlukan. Seorang pemimpin tidak sebaiknya menyimpan seluruh informasi, sehingga semua masalah mesti ditanyakan kepadanya. Seharusnya ada data base yang dapat diakses oleh semua karyawan sehingga jika mereka memerlukan informasi mereka bisa mencarinya sendiri. Tentu saja harus ada pemilahan informasi, hal yang dapat dipublikasikan, hal yang termasuk kategori publikasi terbatas, hal yang termasuk kategori sangat terbatas, dan sebagainya. Teknologi apapun boleh dipergunakan, yang penting mudah diakses dan aman serta tahan lama.
8. Pastikan para karyawan mengetahui bahwa semua prestasi yang mereka capai diketahui

oleh pimpinan dan karyawan lainnya Perhatian atau penghargaan terhadap capaian kerja yang berhasil dicapai oleh karyawan akan dapat meningkatkan semangat kerja individu maupun kelompok. Cara yang dapat dilakukan untuk memperolehnya, antara lain dengan mengumumkan kepada seluruh khalayak dalam media-media informasi yang ada tentang prestasi, ide, dan semacamnya yang dihasilkan oleh karyawan sebagai individu atau kelompok.

9. Sampaikan seluruh perkembangan perusahaan, keputusan keputusan yang diambil, perubahan-perubahan yang terjadi, dan sebagainya kepada semua stakeholders Penyebaran informasi yang cepat dan akurat tentang segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan menyebabkan seluruh anggota perusahaan merasa satu, tidak sendirian, dan merasa ketinggalan informasi.

1. Consulting

Seorang pemimpin tidak cukup hanya memberikan penugasan dan sebagainya, informasi yang berbentuk kebijakan, peraturan, himbauan, dan tetapi juga harus melakukan konsultasi baik internal maupun Konsultasi ada 2 macam, yaitu internal dan eksternal. Konsultasi internal biasanya dilakukan secara perorangan, melalui rapat-rapat pimpinan kelompok, dan sebagainya. Dalam forum ini,

biasanya pimpinan menyampaikan secara gamblang masalah-masalah penting yang dihadapi perusahaan, prospek ke depan, kemajuan-kemajuan yang dicapai, dan kapabilitas yang dimiliki perusahaan. Kemudian, pimpinan meminta anggota kelompok untuk mendiskusikan masalah-masalah tersebut. Misalnya, pimpinan meminta dilakukan kajian untuk penyusunan rencana strategis dan rencana operasional, rencana kerja tahunan, rencana kerja unit tahunan, dan sebagainya. Setelah rencana tersebut tersusun, pimpinan dapat melakukan pembagian tugas dalam bentuk kontrak kerja atau kontrak tugas, yaitu hal yang disepakati bersama harus dikerjakan dan target yang harus dicapai oleh setiap karyawan. Kontrak kerja ini akan mempermudah pimpinan memberikan arahan atau bimbingan, termasuk menentukan kriteria standar kerjanya sehingga kinerja yang dicapai dapat dinilai dengan lebih mudah. Konsultasi eksternal biasanya berbentuk konferensi pers, temu wicara, seminar, audiensi, dan sebagainya. Keuntungan yang dapat dipetik dari kegiatan konsultasi ini seperti berikut. Konsultasi dengan pejabat pemerintah, akan memungkinkan pimpinan mengetahui secara lebih awal peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang

mungkin akan memberikan dampak kepada operasi perusahaan atau pasar produk Konsultasi dengan pengacara atau konsultan hukum perusahaan, akan memberikan informasi tentang kecenderungan litigasi yang berkaitan dengan product liability, rekrutmen dan pemutusan hubungan kerja, dan perubahan-perubahan peraturan hukum tentang hak paten dan copyright.

Konsultasi dengan klien atau calon klien potensial, akan memungkinkan pimpinan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang cara memuaskan klien atau konsumen atau pasar dan meraih kesempatan-kesempatan yang ada. Jika dilakukan secara efektif, kegiatan ini bisa menjadi budaya usaha (corporate culture). Melalui konsultasi ini karyawan mengetahui hal yang harus dia kerjakan, informasi yang dia butuhkan, dan memperolehnya sehingga mereka menjadi pekerja-pekerja yang mandiri memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk dapat memperoleh hasil tersebut, berikut hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh pimpinan, seperti di bawah ini. Tanamkan kepercayaan lebih dahulu sebelum meminta informasi. Umumnya informasi-informasi penting yang ingin diperoleh baik dari dalam maupun dari luar perusahaan sangat sensitif atau sangat

sulit diperoleh (highly sensitive). Misalnya, seorang karyawan memiliki uan atau informasi penting yang sangat berguna bagi pengembangan bisnis, tetapi dia mengetahui bahwa bila informasinya ini diberikan atau bocor ke orang lain maka orang lain itu akan dapat memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

Daripada jatuh ke orang lain, lebih baik dia manfaatkan untuk kepentingan bisnisnya sendiri, atau ada orang di luar organisasi yang memiliki akses kuat ke pejabat penting yang sangat diperlukan oleh perusahaan, dan sebagainya.

Seorang pimpinan, apabila menginginkan informasi penting dari sumber-sumber informasi itu maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah meyakinkan mereka bahwa mereka adalah orang penting yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan, dan bahwa informasi yang diberikan akan sangat berguna bagi perusahaan. Pimpinan juga harus dapat meyakinkan mereka bahwa keamanan mereka terjamin jika mereka memberikan informasi kepadanya.

Pahami betul bahwa konsultasi adalah komunikasi dua arah, bukan komunikasi satu arah Sebagaimana sifatnya, komunikasi

dua arah meng- haruskan adanya “take and give artinya harus ada kemauan untuk berbagi informasi berdiskusi, kompromi, dan sikap yang fleksibel. Jangan berharap informasi yang Anda butuhkan bisa diperoleh secara grati Terutama informasi yang diperoleh dari luar organisasi, umumnya tidak dapat diperoleh secara gratis. Sejumlah imbalan, seperti makan siang, pemberian keanggotaan dalam suatu klub, pemberian diskon, pemberian barang, uang, dan sebagainya harus disiapkan.

2. Mentoring

Mentoring adalah suatu kegiatan membantu bawahan atau rekan sekera untuk mengembangkan keterampilan kerja demi untuk mencapai hasil kerja terbaik. Mentoring merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan karier sehingga hasil akhir mentoring adalah dimungkinkannya seseorang dipromosikan untuk mengerjakan tugas-tugas yang lebih variatif Mentoring yang dilakukan dengan baik akan dapat menghasilkan hal berikut.

1. Meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan tanggung jawab kerja para karyawan.

2. Meningkatkan loyalitas sehingga kecenderungan turn-over dapat dikurangi
3. Pimpinan akan memperoleh tim kerja yang terampil dan penuh tanggung jawab
4. Menyamakan gerak dan langkah yang padu pada semua karyawan di semua lini organisasi.

Menghilangkan atau setidaknya mengurangi kecenderungan burn-out yaitu suatu gejala kebosanan kera akut yang dapat memunculkan cara kerja yang ceroboh, berbahaya, dan tidak bertanggung jawab. Satu hal yang perlu diingat, kegiatan mentoring adalah 'mengajari' orang intuk dapat memimpin, bukan menjadi pengikut. Dengan demikian, seorang pemimpin yang baik harus dapat memberi kesempatan kepada para awaahnya untuk melakukan eksperimen, uji coba, dan mengalami kegagalan sehingga nantinya mereka akan menemukan sendiri cara terbaik ntuk meningkatkan kemampuan dirinya. Agar dapat memperoleh hasil mentoring yang diharapkan, hal-hal yang perlu dipertimbangkan, seperti berikut.

Lakukan pelatihan dalam bentuk praktik nyata Tidak semua keterampilan manajerial itu dapat dilatihkan dalam tahapan-tahapan yang jelas karena sebagian besar justru

harus dipraktikkan. Jadi dalam kegiatan mentoring, kegiatan merumuskan bersama mencoba mengaplikasikannya, melakukan evaluasi, mencoba kembali, dan seterusnya adalah suatu kegiatan yang akan jauh lebih efektif dibanding kegiatan pelatihan berstruktur. Jadilah sumber bacaan, konsultasi, dan pembuka kesempatan berkembang yang andal. Kegiatan mentoring harus memunculkan mentor-mentor lain yang dapat menjadi tempat bertanya, berkonsultasi, dan menjadi contoh yang lain.

Oleh karena itu, dalam operasionalisasinya harus dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap karyawan untuk mengembangkan keterampilannya sehingga nantinya dia dapat menjadi mentor bagi karyawan-karyawan lain yang melaksanakan tugas sejenis.

3. Jadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran. Gunakan pengalaman-pengalaman setiap orang sebagai suatu pelajaran. Setiap orang dalam melaksanakan pekerjaannya, pasti memiliki pengalaman positif maupun negatif yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Jadi dalam kegiatan mentoring, berikanlah kesempatan kepada setiap orang untuk berbagi pengalaman.

4. Sediakan kesempatan orang belajar memperoleh pengalaman mempelajari hal-hal baru. Ada nasehat bijak: I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. Bila orang hanya mendengarkan maka sangat mungkin dia lupa, kalau orang melihat maka masih mungkin dia ingat; tetapi kalau orang mengerjakan maka dia akan mengerti atau paham. Semua pengalaman itu semestinya dimiliki setiap orang, artinya kepada semua orang diberi kesempatan untuk mengikuti ceramah atau mendengarkan informasi tentang sesuatu yang baru, dan diberi kesempatan untuk melihat praktik pelaksanaannya, dan kemudian diberi kesempatan untuk mencoba melaksanakannya. Dengan cara demikian maka setiap karyawan akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bagus untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.
- Kiat Informing, Consulting, dan Mentoring
1. Sesuaikan jumlah, kedalaman, dan intensitas pemberian informasi yang akan diberikan dengan kebutuhan kerja karyawan yang dituju.
 2. Manfaatkan konsultasi sebagai kesempatan untuk berbagi pengalaman dan belajar dari orang lain

3. Lakukan mentoring sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang belajar menjadi pemimpin bukan menjadi pengikut.

BAB III

RIAU SEBAGAI PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU

3.1 Kebudayaan Manusia

Perbincangan tentang kebudayaan adalah tentang manusia. Tidak ada kebudayaan bila tak ada manusia. Kebudayaan adalah proses dan hasil tanggapan manusia terhadap kehidupannya, lingkungan dan perubahan, yang substansinya sama dan bersamaan menjadi kebiasaan, tradisi, adat istiadat, nilai, dan norma bersama sehingga mempengaruhi tingkah laku maupun hasil kegiatan mereka. Oleh karena itu, berlainan rangsangan dan lingkungannya, berlainan pula tanggapan dan kebiasaannya, sehingga bersebab keragaman lingkungan dan rangsangan juga terjadi beragamnya tanggapan yang dibiasakan maka terjadilah keragaman kebudayaan umat manusia. Laksana bunga beragam jenis, warna, bau walaupun dalam suatu lingkungan yang kemudian dipilih menjadi simbol masyarakatnya.

Bahkan ada yang hanya dapat hidup di lingkungan tertentu saja sehingga semakin jelas perbedaannya dengan bunga-bunga lain: kebudayaan lainnya. Lebih dari sebuah kata, kebudayaan juga suatu istilah yang mengandung konsep dan filosofi; yakni mengandung

hakikat, makna, dan hikmah yang dalam. Ia mempunyai implikasi yang luas kepada kehidupan manusia, khususnya dalam wacana filsafat, kesenian, sastra dan sosial. Secara historis, istilah budaya dalam bahasa Indonesia pada mulanya dimaksudkan sebagai terjemahan atau padanan kata *cultuur* (Belanda), *culture* (Inggris) dan *kultur* (Jerman), yang dipilih oleh para cendekiawan Indonesia sebelum Perang Dunia Ke-2.

Dalam akal-pikiran mereka 'cultuur dimaknakan dengan 'harkat kemanusiaan' sebagai dasar pemikiran (konsep) tentang kebudayaan. Apakah betul kebudayaan merupakan padanan yang benar, tepat, dan efisien untuk konsep 'culture? Semen tara ketika bertemu dengan kata *cultural* diterjemahkan menjadi budaya, bukan menjadi kekebudayaan. Padahal yang tepat itu adalah sebaliknya, budaya untuk *culture* dan kebudayaan untuk *cultural*. Budaya adalah kata benda sedangkan kebudayaan adalah kata sifat atau kata keadaan atau kata yang dibendakan, yang artinya adalah hal-hal yang bersangkutan dengan budaya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa budaya Melayu merupakan akal budi orang Melayu, yang mengandung substansi, fungsi, etika, dan artistik yang khas dan dapat dikenali.

Seringkali dihubungkan kebudayaan dengan seni atau art, yang dalam bahasa Jerman dinyatakan dalam kata *kunst*, yakni mampu membuat sesuatu. Ternyata, semua orang mampu kurang lebih membuat sesuatu. Tetapi kita tidak boleh menyatakan semua orang seniman, hanya karena mampu membuat telur rebus, misalnya. Di

sinilah timbul kerumitan dan hal yang membingungkan itu, terutama ketika pengertian tentang karya seni dan seniman ditanyakan kriterianya. Prof Umar Kayam dan Emanuel Subangun, menegaskan hal itu dalam pernyataan: kendala yang dihadapi wartawan dan juga budayawan kita dalam melihat pengertian kebudayaan adalah anggapan sebagai sesuatu harga mati dan statis. Pengertian kebudayaan seorang dianggap sebagai suatu persoalan yang jelas dan mampu memberikan pengertian konkret. Inilah yang menyebabkan pengertian budaya lantas menjadi persoalan yang sempit (Kompas, 26 Mei 1993). Selanjutnya diperjelas lagi oleh Umar Kayam sendiri Kebudayaan bukanlah sesuatu yang berhenti, tapi sesuatu proses dan hal itu ada benarnya, walaupun perlu dipertanyakan bagaimana prosesnya.

Namun dalam kehidupan dan argumentasi sehari-hari terdapat cukup banyak gejala yang terasanya. Sering dikemukakan pengertian kebudayaan yang statis daripada sesuatu yang selalu dalam proses. Karena itu pula misalnya diperjuangkan agar kebudayaan sebagai roh. (Suatu yang semula jadi dan bukan buatan manusia. Roh tidak dapat berubah. Ia ciptaan Tuhan yang tak banyak dike tahui dan di luar jangkauan manusia). Misalnya apakah pembangunan yang bertumpu pada kampung adalah suatu yang sudah mencerminkan roh kebudayaan Melayu. Tampaknya jarang direnungkan bahwa sarana kebudayaan dan fungsinya pada zaman dulu, jarang dianggap sebagai sesuatu yang otonom. Misalnya banyak karya seni dan upacara adat, yang

dianggap merupakan bagian dari roh kebudayaan yang lazimnya dianggap sakral. Artinya berhubungan dengan upacara keagamaan.

Dalam perkembangan tradisi lisan, tampaknya kurang terasa hal itu, sedangkan pada perkembangan tradisi tertulis terasa sekali. Inilah barangkali alasan utama, yang menyebabkan pengertian kebudayaan dianggap statis dalam lingkungan budaya yang bersifat lisan. Contohnya pada musik. Walaupun sebenarnya tidaklah persis seperti itu, sebab budaya lisan atau budaya tertulis sama sekali tidak berhubungan dengan unsur kualitatif, dalam arti anggapan bahwa budaya literal tinggi daripada budaya lisan.

Kemudian kebudayaan diusahakan untuk menampakkan sosoknya. Untuk itu, agar lebih memudahkan dikelompokkan ke dalam substansi dan material yang bersifat fisik, nilai dan etika yang bersifat abstrak dan spiritual, estetika yang bersifat kematangan emosional, serta fungsi yang bersifat kegunaan atau manfaat yang lebih berat kepada rasional.

Dari berbagai persoalan dalam Master Plan Riau 2020 yang amat penting berkaitan dengan kebudayaan Melayu terutama kedudukannya. Ada dua aliran yang berkembang dan kelihatannya memang bertentangan. Pertama, yang menganggap kebudayaan Melayu sebagai sesuatu yang semula jadi seperti roh, sakral, final dan tak layak dibangun atau diubah. Sedangkan yang lain menganggap bahwa seperti setiap kebudayaan, kebudayaan

Melayu pun bersifat baharu buatan manusia, berawal, berubah, bahkan mungkin saja berakhir dinamis, boleh diubah, dan dapat pula dijadikan objek untuk dibangun. Karena itu tidak layak dijadikan roh suatu pemba- ngunan. Apalagi kalau sudah terbukti dalam sejarahnya yang panjang tak mampu bersaing dalam sumbang nya kepada manusia dan dunia, bahkan telah berulang kali kalah ketika berhadapan dengan kebudayaan dan peradaban lain, seperti terhadap kebudayaan India, Cina, Barat, dan lain-lain sepanjang sejarahnya, baik dalam pertembungan kebudayaan dan peradaban dunia maupun dalam mempertahankan hidupnya, kebudayaannya sendiri, sehingga Hang Tuah perlu mengeluarkan deklarasi takkan Melayu hilang di bumi.

Maka patut ditelusuri dan disigi bagaimanakah kebudayaan Melayu dalam konsep dan filosofinya. Ini berarti membicarakan proses terbentuknya kebu dayaan, hakikat keberadaannya, makna, dan hikmahnya. Ini juga mencoba menyimak perjalan an suatu kebudayaan dan perubahan sejarahnya. Itu bukanlah suatu pekerjaan yang kecil dan boleh dikerjakan dalam sebarang kertas kerja, seperti makalah ini.

Riau pernah menjadi pusat kebudayaan Melayu sejak masa awalnya, yang dapat dikenali dari sumbangannya pada peradaban dunia dalam bentuk bahasa, pelayaran dan kemahiran membuat kapal dan alat-alat penangkapan ikan. Akan tetapi ketiadaan upaya pengembangan yang berkelanjutan dan bertembung

dengan kebudayaan lain yang lebih efisien, maka terjadi keterke belakangan dan kemerosotan yang parah.

3.2 Skenario Masa Depan

Gambaran perubahan kebudayaan manusia dari masa ke masa dapat disederhanakan dengan merujuk kepada perjalanan sejarah umat manusia dengan menunjukkan perkembangan masyarakat yang bergerak dari primitif tradisional agraris industri knowledge based. Perubahan itu terjadi baik secara alamiah, direncanakan melalui penerapan teknologi, perkembangan ekonomi, ataupun pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan ke arah masa depan. Sedangkan masa depan mempunyai ciri khas penting pasti berubah, namun penuh ketidak pastian dalam hal substansi perubahannya, tidak ada pengendali perubahan masa depan, maupun yang merencanakan perubahan masa depan, dan perubahan yang terjadi semakin cepat, bahkan yang wujud di masa depan sering paradoks atau incongruent dengan harapan manusia. Dalam suasana demikian itu, manusia mencoba membangun masa depannya melalui perencanaan pembangunan, seperti yang dilakukan Riau dengan Master Plan Riau 2020 .

Ada tersirat keinginan mempertentangkan kebudayaan yang akan dibangun dengan hasrat untuk menggunakan kebudayaan yang dianggap siatis dan sudah final sebagai asas atau roh pembangunan. Ada yang mengira bahwa budaya sebagai sesuatu yang sudah

selesai oleh nenek moyang manusia, dan karenanya manusia belakangan tidak ada hak dan peluang lagi membangun kebudayaannya sendiri, atau memberi andil bagi mengembangkan atau memperkaya kebudayaan yang ada secara continuum. Pertanyaan yang mengusik pikiran adalah apakah benar bahwa budaya suatu bangsa atau masyarakat sudah final. Apakah akan jaya suatu kebudayaan tanpa dikembangkan serasi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi di masa depan? Antara suatu budaya dengan budaya lain yang lebih dinamis dan efisien manakah yang akan survive? Tentulah akan kalah budaya yang tetap, tak berkembang dan tidak sangkil. Jika suatu kebudayaan sudah final, maka berarti kreativitas yang muncul dalam menghasilkan ilmu, teknologi, dan seni, tidak diperlukan lagi. Suatu masyarakat yang tidak dinamis, efisien dan unggul mustahil akan dapat menjadi pusat suatu kebudayaan.

Bila ditengok perkembangan kesejahteraan, kebudayaan dan peradaban umat manusia setidaknya menjelang tahun 2020 dipengaruhi oleh perkembangan dan penerapan enam teknologi (6T) utama: teknologi informasi dan komputer, bioteknologi., teknologi samudera, teknologi energi, teknologi bahan, dan teknologi ruang angkasa. Sedangkan pada paruh akhir abad 21 akan berkembang ekoteknologi dan nonteknologi.

Teknologi itu menampakkan sosoknya pada lima bidang ekonomi (5T) utama: perdagangan (trade), pen-

gangkutan (transportasi), pariwisata (tourism), telekomunikasi produksi teknologi (tech nology development). Teknologi sebagai bentuk fisik dari kebudayaan adalah buatan manusia.

Bila dicermati keadaan struktur sumber daya manusia di Riau pada dewasa ini dibandingkan dengan persyaratan ambang batas (threshold) agar dapat memasuki masa depan itu, maka akan terlihat faktor yang memperlebar jarak antara idealisme kebudayaan Melayu dengan realitas sosialnya seperti tercermin pada tabel di bawah ini yang menunjukkan bahwa keadaan sekarang dan ambang batas yang harus ada.

Riau akan mungkin menjadi pusat kebudayaan Melayu bilamana sumber daya manusianya berada pada ambang batas.

Sebagai contoh, satu perbandingan saja ialah Thailand dengan penduduk 58 juta jiwa mempunyai 100.000 maha siswa teknik dan 10.000 insinyur yang dihasilkan setiap tahun. Sementara Riau dengan penduduk lebih 5,7 juta jiwa hanya mempunyai 4000 mahasiswa teknik, dan menghasilkan hanya sekitar 200 orang insinyur per tahun.

Gambaran antara konsep dan filosofi kebudayaan Melayu di Riau dengan realitas sosial masa kini secara kasar belum mendukung Riau memasuki masa depan. Konsep kebudayaan dalam antropologi berawal dari reaksi dan respon yang sama dari masyarakat terhadap gejala tertentu yang terjadi. Tanggapan yang sama

timbul karena memiliki sikap umum, nilai dan perilaku yang sama. Hal hal yang dimiliki bersama itulah yang dinamakan kebudayaan. Sifat kebudayaan itu ialah menjadi milik manusia bersama melalui proses belajar; hal hal yang dimiliki bersama dalam suatu masyarakat tertentu, yang merupakan kebiasaan (pola budaya) yang ideal yang harus dilakukan atau norma. Dalam kenyataannya norma dalam banyak hal tidak sesuai dengan perilaku aktual.

Kebudayaan sebagai sesuatu yang nyata (kebiasaan dan perilaku) berkembang kepada nilai, yaitu menyaring hal-hal yang sangat berharga dan bermutu dari kebiasaan atau tradisi. Tingkat selanjutnya meningkat menjadi norma, yaitu hal yang ideal, yang harus dilakukan. Perkembangan kebudayaan seperti itu terjadi sebagai akibat adanya pembelajaran, suatu proses belajar yang dilakukan secara sengaja maupun secara alamiah, yang tentu saja hasilnya akan berbeda pula.

Kebudayaan berawal dari tanggapan yang sama secara bersama terhadap kenyataan, alam dan kejadian secara bersama kemudian menjadi kebiasaan atau tradisi. Tradisi yang baik, berharga, bernilai luhur, menjadi nilai. Nilai-nilai yang ideal kemudian menjadi hal yang dianggap layak dimuliakan menjadi norma, yang diharapkan menjadi aturan cita-cita yang mengatur tingkah laku masyarakatnya.

Menurut Ruth Benedict, kebudayaan merupakan pola pemikiran serta tindakan yang terungkap dalam

kegiatan. Dengan demikian pada hakikatnya kebudayaan itu, menurut Ashley Montagu, ialah way of life, cara hidup tertentu, yang memancarkan identitas tertentu pada suatu bangsa. Kebudayaan, menurut Soerjanto Poespowar doyo (1989:218-219) ialah keseluruhan proses dan hasil perkembangan manusia yang disalurkan dari generasi ke generasi untuk kehidupan manusiawi yang lebih baik. Kebudayaan dapat pula diartikan sebagai upaya masyarakat untuk terus-menerus secara dialektis menjawab setiap tantangan yang dihadapkan kepadanya dengan menciptakan berbagai prasarana dan sarana, yang pada intinya ialah proses terus-menerus menyimak kadar dinamika dari sistem nilai dan sistem kepercayaan yang mapan dalam masyarakat. (Nat. J. Coletta King dan Umar Kayam, 1987:313)

Tiap kebudayaan mempunyai tiga wujud isi sebagai: 1) suatu himpunan gagasan, yang tak dapat dilihat atau diamati, karena tersimpan dalam kepala orang. Ini disebut cultural system atau sistem budaya, atau disebut juga covert culture, 2) jumlah perilaku yang berpola, yang disebut social system atau sistem sosial, 3) sekumpulan benda dan artefak, yang disebut kebudayaan fisik atau physical culture. Bagian dua dan tiga disebut juga overt culture.

Nilai budaya merupakan bagian dari sistem budaya, yaitu yang menyangkut aspek gagasan. Dalam kaitan ini nilai budaya merupakan sejumlah pandangan mengenai soal yang paling berharga dan bernilai dalam hidup. Karena itu disebut juga sistem nilai. Karena merupakan

inti dari sistem budaya, nilai budaya menjiwai semua pendoman yang mengatur tingkah langkah warga pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Pedoman tingkah laku itu ialah adat-istiadat, norma, etika, moral, sopan-santun, pandangan hidup, dan ideologi pribadi.

Soal pokok yang paling tinggi nilainya dalam hidup manusia ada lima hal, yaitu 1) makna hidup manusia, 2) makna pekerjaan, karya dan amal perbuatan manusia, 3) persepsi manusia mengenai waktu, 4) hubungan manusia dengan alam sekitarnya, 5) hubungan manusia dengan manusia. Ke-lima soal pokok yang bernilai dalam hidup manusia itulah yang menjadi isi dari sistem nilai budaya dalam setiap kebudayaan di dunia. Persepsi dan konsepsi mengenai kelima hal isu pokok itu berbeda-beda dalam berbagai kebudayaan. Budaya secara struktural mengandung: isi, fungsi, etik, artistik. Isi sebagai substansi nyatanya dapat berupa fisik, bentuk, produk atau benda. Secara abstrak substansi berupa nilai, hal-hal yang dianggap baik dan benar, serta moral yang dijadikan pedoman dan milik bersama. Kedua hal itu mempunyai fungsi dalam kegunaan, manfaat, pengaruh dan dampak dalam perilaku dan tindakan individu dalam masyarakat. Yang muncul sebagai suatu yang artistik dalam keelokan, keindahan, kebagusan, kecantikan dan kemolekan. Secara keseluruhan hal itu merupakan budaya, yang dalam perkembangan selanjutnya dikenali sebagai peradaban masyarakat.

Filosofi dan konsep kebudayaan Melayu dan keme layuan sebagai roh pembangunan adalah suatu yang rumit. Sebagaimana sifatnya, roh tidaklah nyata, melainkan abstrak, sedangkan pembangunan adalah nyata (riil). Bahkan dalam Al-Quran ada dua hal yang tak layak ditanyakan atau dikaji, zat Allah dan roh.

3.3 Pandangan Dan Harapan

Tantangan masa depan berada dalam suasana obalisasi dan perdagangan bebas, terjadinya persaingan dan persandingan yang berasaskan esiensi, mutu dan pelayanan yang berlandaskan tasyarakat madani. Maka, untuk wujudnya keajaiban di masa depan, upaya mengembangkan budaya yang berorientasi masa depan dalam mengembangkan masyarakat, teknologi dan ekoomi merupakan keniscayaan. (Muchtah Ahmad, 2002) Saya tidak dapat memastikan bagaimana kebudayaan masa depan karena hal itu amat terjantung pada banyak anasir yang mempengaruhi Jerubahan tanggapan umat manusia maupun Penyebab perkembangan kebudayaan itu sendiri.

Seperti diungkapkan Stiglitz, serangan terorisme terhadap Amerika Serikat ditujukan terhadap simbol-simbol kekuasaan yang bersifat kekerasan dan materialisits, yaitu Pentagon sebagai simbol kekuasaan kekerasan di satu sisi, dan simbol kekuasaan materialistis ekonomi dengan diruntuhkannya World Trade Center di sisi lain. Demikian pula simbol hedonisme seperti

serangan terhadap klub malam yang diskriminatif di Bali. Kenapa bukan misalnya universitas, lembaga penelitian, pasar, museum, dan teater Broadway sebagai simbol kebudayaan yang dibom, misalnya?

Maka, untuk menyelamatkan manusia dan kebudayaannya, kemungkinan besar tidaklah seperti apa adanya jalan yang dilakukan sampai dewasa ini, yaitu melalui kekuasaan, peperangan, dan kampanye apa pun dengan ciri khas kekerasan dan pemaksaan. Pasti ada jalan lain, akan tetapi perlu adanya kesadaran akan keragaman alamiah, yang tak satu kebudayaan pun yang berhak memonopoli kebenarannya, dan karena itu memaksakan kebudayaannya. Jalan lain itu haruslah berupa kesadaran baru yang memungkinkan semua kebudayaan hidup berdampingan secara damai.

Gagasan menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat kebudayaan adalah idealisme yang elok. Ada dua pengertian yang dapat didudukkan. Pertama, secara positif fisik pusat kebudayaan Melayu ada dan berkembang menjadi rujukan dan idaman orang berbudaya Melayu. Seperti Palembang pada masa jaya Sriwijaya. Berarti secara kebudayaan ada keunggulan dan kelebihan di Riau pada suatu masa. Hal itu hanya mungkin saja terjadi kalau social capital Riau sudah tersusun dan terakumulasi dengan sistematis. Social capital lahir dalam karakter budayanya karena dia memegang nilai-nilai bersama dan adanya saling percaya (trust) dan jejaring kerja sama untuk memajukan kebudayaan Melayu dalam persaingan

bahkan benturan dalam globalisasi. Karakter budaya yang unggul, keper cayaan, dan jejaring kebudayaan Melayu itulah yang belum ada dewasa ini terbentuk secara nyata, walaupun di masa lalu hal itu pernah wujud, seperti dapat disimak dari sejarah terbentuknya Melayu di nusantara ini.

Ketika nenek moyang Melayu berlayar dari berbagai penjuru dunia dari Utara dan dari Timur - dengan berlayar dan menghuni kepulauan nusantara di khatulistiwa dan berbaur dengan penduduk asli kalau ada, maka ada tiga substansi budaya yang dibawanya, yaitu bahasa, maritim dan pertanian. Kosa kata dan kekayaannya menunjukkan keaslian budaya suatu masyarakat. Mengenai kapal terdapat banyak istilah di dunia Melayu, yang sebagian besar menjadi kosa kata internasional seperti jung, sampan, funa, phinisi, dll. Demikian pula, sebuah kapal berukuran 300 ton yang melabuh di pelabuhan Malaka pada awal kedatangan pedagang Barat dan Cina, konon dapat meninggalkan pelabuhan itu dalam tempo dua jam, tanpa adanya kongesti seperti yang terjadi di pelabuhan barang Riau dewasa ini. Jadi sesung guhnya Riau pernah menjadi pusat kebudayaan dan bahkan juga ekonomi di Asia Tenggara bebe rapa puluh abad yang silam.

Kedua, dengan mengembangkan kreativitas yang unggul sehingga dapat memberikan sum bangan kepada peradaban dunia. Sumbangan yang amat penting oleh orang Melayu pada pera daban dunia ialah bahasa

Melayu, konstruksi kapal dan pelayaran atau navigasi. Beratus tahun mereka biasa membangun kapal dan mengem bangkannya, sehingga ketika para peneroka Barat dan Arab menemukan kapal besar untuk ukuran pada masa itu (300 ton) di pelabuhan Melayu yang mereka singgahi, mereka mengaguminya. Mereka membawa para nakhoda dan tukang-tukang kapal itu ke Portugis, mematematisasi konstruksi dan rancangan kapal yang kemudian amat berkem bang di Inggris, sehingga akhirnya Barat mampu nyai kapasitas dan kompetensi yang kuat dalam membangun dan melayarkan kapal-kapal untuk menguasai dunia, termasuk menjajah Indonesia.

Akan tetapi di dunia Melayu sendiri, karena ilmu dan teknologi tidak terlembaga untuk mengembangkannya, sehingga hanya sampai pada kemampuan dan kompetensi seperti yang masih ditemukan pada galangan kapal di nusantara dewasa ini, termasuk di pelbagai tempat di Riau. Ketiga, pusat kebudayaan Melayu dari aspek kepemimpinan, yaitu sebagai wilayah utama dalam pengembangan kebudayaan Melayu, yang secara simbolik memimpin budaya Melayu lainnya dalam pengembangan tersebut. Ini bermakna bahwa Riau haruslah berada pada ufuk terdepan dari upaya memajukan kebudayaan, dan untuk itu tentulah perlu dilakukan restorasi orientasi terhadap kebudayaan dunia dan masa depannya. Ketika Melayu menguasai teknologi utama (maritim) pada masa itu, tetapi tidak berupaya mengembangkannya secara berkesinambungan, maka karena ka-

lah efisien dan kualitas dengan orang yang belajar dari mereka, akhirnya Melayu menjadi terkebelakang bahkan dijajah.

Apa pelajaran yang didapat dari peristiwa itu? Pertama, budayanya tidak berkembang atau tidak ada upaya mengembangkannya secara kelembagaan dan berkelanjutan. Kedua, lemahnya orientasi masa depan, karena pada saat itu masa depan berada di tangannya sendiri, sehingga lupa untuk mengembangkannya. Ketiga, efisiensi adalah kunci kejayaan di gelanggang budaya, masyarakat, teknologi maupun ekonomi. Berdasarkan kenyataan keluaran teknologi, ekonomi, yang terjadi dewasa ini, maka kebudayaan telah kalah terhadap kebudayaan. Sebab-sebab kalahnya tak banyak « antaranya ialah hilangnya hasrat ilmu kaya dan mengembangkan kebudayaan yang ada, sebab menganggap kebudayaan sudah final. Masa depan jelas semakin kental dengan suasana globalisasi dan perdagangan bebas, yaitu suatu proses dan keadaan, ketika lalu-lintas barang, jasa, modal dan penanamannya, maupun lalu-lintas orang semakin sedikit dan berangsur hilang hambatannya. Ketika itu pula terjadi persaingan dalam kerjasama, sehingga hanya budaya yang sanggup bersaing dan bersanding saja yang akan menang atau mampu berperan dalam masa depan kebudayaan dan peradaban umat manusia. Hanya budaya yang berorientasi ke masa depan, yang menyadari secara arif kemungkinan perkembangan masyarakat oleh pengaruh perkembangan teknologi dan ekonomi di masa depanlah yang akan dapat me

masuk ke arus pertembungan kebudayaan dan peradaban dunia. Untuk mewujudkan hal itu, maka awalnya dimulai dengan mencari potensi sosial yang ada, dan mengembangkan nilai yang mewarnai budaya sehingga dapat dijadikan modal dalam mengharungi masa depan.

Keberadaan suatu budaya akan bermakna apabila mampu memberikan sumbangan kepada kebudayaan dunia, terutama melalui kegiatan yang mengembangkan ilmu, teknologi dan seni.

3.4 Pemahaman Kebudayaan

Bagaimanapun tidak persisnya gagasan dan pemahaman tentang kebudayaan, tetap saja ada kesadaran bahwa kebudayaan itu ada dan diperlakukan. Bahkan ketika perkembangannya meningkat menjadi peradaban suatu tamadun, ia kemudian dijadikan simbol, diluluskan dan dipuja, dianggap suci serta puncak dari pencapaian manusia, yang harus diperjuangkan dan dipertahankan terhadap kebudayaan lain atau dijadikan alasan untuk menguasai dan mempengaruhi kebudayaan lain. Misalnya ketika Islam menyeberang ke Eropa pada awal abad 12, dan menyumbangkan renaissance pencerahan rasionalisme kembali kepada benua itu, maka ketika itu timbullah pertentangan kebudayaan Islam dan Romawi, yang pada kelanjutannya berubah bentuk dalam Perang Salib, dan kini gilirannya dapat juga berkembang menjadi perbenturan peradaban atau the clash of civilization, meminjam istilah Samuel P Huntington, tanpa tu-

juan yang jelas, tanpa alasan akal sehat, selain dari nafsu kekuasaan ingin menguasai dunia dan megalomania adidaya.

Tragisnya lagi justru membawa kemiskinan dan kemelaratan kepada penduduk jajahan Barat. Di sisi lain, sepanjang sejarah perkembangan kebudayaan dan peradaban umat manusia, secara mudah dapat dilihat ada dua arah yang menyebabkan perkembangan kebudayaan dan peradaban itu. Pertama, karena memang diusahakan dengan sengaja dikembangkan, baik diawali melalui gagasan, pemikiran dan pendidikan, maupun melalui penyelidikan yang hasilnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti teknologi, kebijakan, kaedah dan norma. Kedua, karena adanya konflik, yaitu suatu perbedaan yang bertentangan, terutama dalam hubungan antarkebudayaan atau peradaban yang ada. Pertentangan bila semakin berkembang dapat menjadi perang, dan pemenang yang ke luar berhak memaksakan kebudayaan dan peradabannya pada yang kalah, seperti yang terjadi pada perang dunia kedua, dan yang sedang terjadi di Afganistan atau yang juga terjadi di Irak serta dunia Islam lainnya di masa yang akan datang.

Berkenaan dengan gambaran dan perkembangan seperti itu, maka timbul berbagai persoalan yang menarik untuk disimak tentang kebudayaan masa depan atau tentang masa depan kebudayaan, yang pada hakikatnya juga bermakna masa depan manusia dan kemanusiaan masa depan. Maka, teringat saya tulisan Bertrand Russell yang berjudul Adakah Masa Depan Manusia?

Kebudayaan manusia di masa depan seperti yang ingin diseragamkan Amerika Serikat dan dunia Barat lainnya setelah dimenangkannya perang panas dan dingin antara sosialis dan kapitalis pada abad 20 maupun kemenangan dalam kampanye terhadap teroris akhirnya mereka mempunyai hak dan kewajiban memaksakan gagasan kebebasan, demokrasi, peduli pada hak asasi manusia, atau apa pun rumusan indah peradaban yang sedang diperjuangkan pada saat ini, sesungguhnya peluangnya amat kecil terwujud.

Alasan atau sebab sejarahnya lihatlah ketika Iskandar Agung mencoba menguasai dunia dengan kekuasaan adidaya yang lebih berisi kemanusiaan, tak ada bekasnya lagi di Mesir, Persia maupun India. Demikian pula Mongol tak ada bekas kebudayaannya di Timur Tengah, Asia Tengah, maupun Cina dan Asia Tenggara. Amati pula bekas kebudayaan Barat di negara bekas jajahannya, yang kini berbalik kepada kebudayaan Iun. yang semakin radikal diperjuangkan masyarakat negeri-negeri bekas jajahan itu. Coba pula perhatikan bekas negara Uni Sovyet, yang gagal membanjirkan kebudayaan dan peradaban baru, bahkan justru menumbuhkan kembali kebudayaan lokal yang asal, sehingga walaupun sudah 50 tahun lebih diupayakan keseragamannya namun tetap juga memberikan kesan kehidupan kembali kebudayaannya, jatidirinya. Perhatikanlah kenya taan tanggapan dewasa ini yang terbagi tiga, men dukung, menentang dan tidak peduli atau menetapkan perjuangan sendiri terhadap kebijakan pre emptivenya Amerika Serikat.

Posisi Riau dalam peta percaturan kebudayaan Melayu serantau dan dunia di masa depan tak mudah meramalkannya. Peluangnya ada tiga, sebagai pusat rujukan kebudayaan Melayu, penyumbang utama kebudayaan, dan kepemimpinan yang kuat dalam kebudayaan Melayu. Semuanya ditentukan oleh social capital, daya cipta atau kreativitas, serta juga tergantung kepada keputusan masyarakatnya, terutama tentang tujuan dan hakikatnya. Kalau hakikat kebudayaan Melayu itu adalah keberadaan, dan keberadaan itu diukur dari ukuran sebenarnya berdasarkan sumbangannya kepada dunia, maka upaya mendahului atau bersaing dalam memajukan masyarakat, teknologi, dan ekonomi masa depan merupakan keniscayaan.

Kebudayaan Melayu dan kemelayuan akan tak hilang di bumi bila ikut dibangun menanggapi zamannya sekaligus meneroka perkembangan masyarakat, ekonomi dan teknologi masa depan dunia itu. Ini bermakna harus ada upaya mereorientasikan kebudayaan Melayu ke masa depan, dan mengurangi kadar keterikatan kepada masa lalu. Umat manusia sedang dalam proses membangun kebudayaan dan peradaban baru. Tergantung kepada masing-masing masyarakat untuk mengambil keputusan keikutsertaan. Untuk itu suatu pola berpikir bahwa kebudayaan Melayu itu dinamis, lentur, terbuka terhadap perubahan untuk penyempurnaannya, serta tidak statis dan final merupakan keniscayaan. Dengan mendudukan posisi kebudayaan Melayu baru dalam pentas skenario masa depan yang paling mungkin, akan dapat dilakukan pembangunan berwawasan kebudayaan Melayu bahkan kemelayuan itu men jadi mungkin sebagai pemainnya.

BAB IV

IMPLEMENTASI VISI MISI RIAU DARI GUBERNUR SALEH DJASIT HINGGA SYAMSUAR

Pada bagian ini akan dijelaskan implementasi visi misi Riau mulai dari Gubernur Saleh Djasit hingga Syamsuar dan Edi Natar guna mewujudkan Visi Riau 2020 yakni TERWUJUDNYA PROVINSI RIAU SEBAGAI PUSAT PEREKONOMIAN DAN KEBUDAYAAN MELAYU DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN DI ASIA TENGGARA TAHUN 2020.

4.1 Gubernur Saleh Djasit



Menjadi Gubernur dari tahun 1998 sampai dengan 2004, lima tahun bukanlah waktu yang terlalu panjang untuk sebuah rencana dan gagasan besar. Tetapi juga bukan waktu yang terlalu pendek untuk mencoba mewujudkannya.

Dua tahun pertama masa kepemimpinan Saleh Djasit (1998-2000) lebih difokuskan pada penyelenggaraan pemerintahan transisi daerah. Hal ini terimbas angin reformasi yang terjadi secara nasional kala itu. Dalam masa dua tahun itu praktis belum banyak tugas pembangunan yang terealisasi. Selaku Gubernur pada masa transisi Saleh Djasit kerap menghadapi situasi labil yang ditandai dengan demonstrasi yang berulang kali. Akibatnya konsentrasi pun menjadi terpecah untuk mencari solusi pemecahan berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.

Hal itu diakui Saleh Djasit dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan September 2003. Saleh konsentrasi utamanya meletakkan landasan pelaksanaan pembangunan Provinsi Riau dan akhirnya berhasil merampungkan arah pembangunan Riau ke depan dengan ditetapkan nya (Poldas) 2001-2005 yang memuat Riau 2020 dan dikukuhkan menjadi peraturan daerah. Gubernur mengatakan, arah pembangunan Riau ke depan telah diletakkan dasarnya, yaitu menjadikan Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara Lalu apa upaya-upaya pada tahun pertama khususnya di bidang infrastruktur Mencermati laporan keuangan Pemprov Riau tahun pertama menjadi Gubernur, memang angka-ang-

ka yang tertera dalam APBD Riau tahun 1998/1999 belum menunjukkan angka-angka signifikan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur negeri besar yang bernama Riau ini. Total dana APBD Riau 1998/1999 Rp 358 miliar lebih. Dari total dana lebih dua pertiga dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai kabupaten dan kota habis Rp 201,9 miliar. Untuk belanja rutin merencanakan anggaran sebesar Rp 156,1 miliar

Dari data ini tercermin bahwa meski anggaran jauh lebih kecil dari anggaran tahun 2003 namun upaya mengejar ketertinggalan infrastruktur itu tetap menjadi prioritas karena menyerap anggaran lebih dari dua pertiga. Lonjakan penerimaan daerah Riau setelah otonomi daerah mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2001 pun terlihat.

Dari pendapatan asli daerah murni (PAD murni) yang pada tahun pertama tercatat Rp 95 miliar, pada tahun 2003 melonjak menjadi Rp 409 miliar (setara dengan total APBD Kota Pekanbaru) atau naik 430 persen. Total anggaran Riau yang sebelum otonomi daerah diberlakukan hanya Rp. 358 miliar lebih, pada tahun 2003 melonjak tinggi mencapai Rp Rp1,968 triliun. Artinya telah terjadi peningkatan penerimaan anggaran menjadi Rp1,610 triliun selama lima tahun anggaran atau meningkat sebesar 449 persen dibanding tahun anggaran 1998/1999.

Penerimaan itu tak terlepas dari dana perimbangan pusat daerah yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana rutin daerah. atau dana alokasi umum (DRD/DAU), dana pembangunan daerah atau dana alokasi khusus (DPD/

DAK). Gambaran angka-angka itu menunjukkan bahwa ada kekuatan dana untuk membangun infrastruktur di bumi Lancang Kuning ini. Apalagi setiap kabupaten dan kota juga sudah ada anggarannya sendiri. Tentu menarik dicermati sudah sejauh mana anggaran pembangunan itu diserap dan bagaimana hasilnya.

Di Kabupaten Natuna, misalnya, alokasi dana Pemprov Riau untuk membantu membangun kabupaten ini terbilang cukup besar. Dari dana bagi hasil migas Natuna menerima Rp 112 Milyar. Kabupaten yang semula nyaris tak memiliki jalan raya yang referesentatif ini kini pun mulai menggeliat. Jalur-jalur jalan utama mulai dibuka lebar. Bahkan jalan akses berbagai potensi wisata yang selama ini hanya jalan setapak dan dipenuhi hutan rimba di sekelilingnya mulai dibuka. Berbagai jalan lingkar pun dibangun. Batam sebagai andalan devisa bergabung ke Batam lepas dari Riau karena pun Kepulauan Riau, perhatian Gubernur mutiara terarah ke Dumai. Dumai menjadi hitam Pulau Sumatera yang juga perlintasan kapal dagang dunia. Lewat kerjasama yang baik antara wali kota Dumai dengan Gubernur, sejumlah proyek besar pun digagas seperti pembangunan jalan, pelabuhan peti kemas bertaraf internasional, pembangunan kawasan resort wisata modern dan sebagainya. Proyek besar itu termasuk pembangunan Masjid Raya Dumai, terminal argo dan terminal. Peletakan batu pertamanya di Baganbatu langsung diresmikan Gubernur Saleh Djasit tahun 2002.

Semangat membangun berbagai sarana dan prasarana menuju Visi Riau 2020 juga dituangkan dalam Master Plan Riau 2020. Kendati sempat menuai kritik dari Lembaga Adat

Melayu Riau, tidak membuat semangat Pemprov Riau memudar. Begitu juga ketika Gubernur menggagas proyek-proyek strategis yang dinilai DPRD Riau terlalu banyak menyedot dana APBD dan perlu dipangkas, ternyata belakangan terkuak bahwa bukan itu masalah sebenarnya, melainkan anggota merasa belum memberi persetujuan Gubernur untuk melaksanakan proyek-proyek itu dengan multiyears.

Gubernur pun mengalah dan kembali memohon persetujuan secara resmi meski di APBD 2002 ini di buku lintang sudah berbunyi proyek multiyears. Meski alot akhirnya lanjutan proyek-proyek strategis itu disetujui DPRD. Semangat membangun lewat proyek proyek strategis ini sempat menimbulkan anggapan bahwa sang Gubernur cenderung membangun proyek mercusuar dan tak menyentuh rakyat banyak. Saleh punya alasan lain. Menurutnya proyek strategis itu bukanlah proyek mercusuar seperti yang ditudingkan itu. Saleh mengatakan, proyek strategis itu merupakan implementasi dari program pembangunan yang didasarkan pada lima pilar pendukung. "Ini bagi saya merupakan perintah dari rakyat lewat DPRD sesuai dengan Perda Nomor 36/2001, pilar pertama Visi Riau 2020 menitikberatkan pada pembangunan keimanan dan ketakwaan. Secara fisik pilar ini ditandai dengan pembangunan ulang Masjid Nur. "Banyak masukan yang saya terima Masjid Agung direnovasi karena kondisi Masjid Agung Pembangunannya sudah banyak yang Masjid Agung An-Nur ini bukan pesan tetapi ada atau berharap sebagai di sana memiliki masjid yang nyaman ibukota terbuka yang bisa space atau sholat Id dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah dan bisa juga untuk olahraga disore hari. Visi Riau kedua menekankan pembangunan pada

Pilar pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Implementasinya adaah dengan membangun fakultas kedokteran universitas Riau. Menurutnya, dipermukaan proyek ini kesannya memang show of force tetapi lebih dari itu proyek ini dipersiapkan untuk untuk panjang sebagai wadah anak negeri ini untuk menimba ilmu kedokteran di daerah mereka sendiri. Pilar ketiga, ekonomi kerakyatan. Menurutnya, pemprov berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan pola dana bergulir bunga rendah. Ini sebagai motivasi agar masyarakat mau proaktif dibandingkan jika hanya diberikan begitu saja seolah-olah pemerintah ini sama seperti sinterklas. Untuk mewujudkan pilar ketiga ini, Pemprov Riau juga sudah mendirikan perusahaan PT Permodalan Ekonomi Rakyat yang bertugas membangun ekonomi dana tahun 2001 menganggarkan sebesar Rp 70 miliar, tahun 2002 naik menjadi 100 miliar dan 2003 menjadi Rp 150 miliar.

Pendirian PT PER juga tak sepi dari kritik karena di anggap mubazir, padahal ada bank yang bisa berfungsi sama. Namun Saleh punya pikiran lain. Menurutnya, dasar pembentukan PT Pernodalan Ekonomi Rakyat agar dana yang dianggarkan tidak dikelola seperti sistem proyek yang pimpronya berganti-ganti dari tahun ke tahun.

Soal mengapa tak diserahkan ke bank, menurutnya lagi, karena saat ini masih banyak masyarakat ekonomi lemah yang tak mau berurusan dengan bank. Pilar keempat adalah kesehatan dan olahraga. Selama ini kurang perhatian pada kedua bidang ini. Kita memang punya rumah sakit, tetapi alakadarnya. Orang lari juga ke Malaka. Lalu Gubernur

berupaya mewujudkan sebuah rumah sakit andal melalui lima tahap.

Tahap pertama membangun gedung berlantai tujuh ditambah peralatan kesehatan serta sistem yang standar internasional. Untuk bidang olahraga sekarang sudah dibangun sport centre yang modern dan diharapkan rampung tahun ini. Pilar kelima adalah kebudayaan.

Menurut Gubernur, cakupan budaya itu luas sekali. Oleh karena itu dibuat dulu tempat berkarya. Untuk jangka panjang, siapkan gedung teater terbuka dan tertutup Selain proyek strategi juga proyek-proyek raksasa non-APBD mulai digagas, di antaranya pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai, pelabuhan internasional dan pembangkit listrik. Satu per satu mulai terealisasi.

4.2 Gubernur Rusli Zainal

Gubernur Riau selama 2 periode, yaitu 2003-2008 dan 2008-2013.



Pembangunan SDM menjadi program utama pemerintah Provinsi Riau. Hal ini tercermin dalam program yang digencarkan saat ini, yakni program pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur (K2-I). salah satu upaya dan langkah strategis yang dilakukan untuk peningkatan SDM masyarakat tersebut, adalah dengan memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan di Riau.

Di samping itu, kriteria pendidikan yang diperlukan dalam mewujudkan Visi Riau 2020 tersebut untuk dapat menghasilkan SDM yang berkualitas, memiliki prinsip-prinsip yang meliputi pembinaan perilaku (attitude), pengembangan kemahiran (skill, dan mempertinggi serta memperluas ilmu pengetahuan (knowledge) Terwujudnya SDM yang handal dan berkualitas juga diharapkan dalam rangka untuk kesiapan di era perdagangan bebas, seperti AFTA yang saat ini telah diberlakukan dan APEC pada tahun 2010-2020 dan juga dalam rangka keterlibatan Indonesia, khususnya Riau dengan berbagai bentuk kerjasama ekonomi Sub Regional, seperti IMS-GT dan IMT-GT. Di bawah kepemimpinan Rusli Zainal, Pemerintah Provinsi Riau saat ini tengah memfokuskan/memprioritaskan tiga program utama, yakni Program Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Ketertinggalan SDM, dan Program Pembangunan infrastruktur, dikenal dengan Program K2-I.

Diharapkan semua sektor dan bidang pembangunan diarahkan dan mendukung Program K2-I ini, sehingga pada saatnya nanti, apabila masalah pokok ini dapat diselesaikan, maka akan menjadi landasan yang kuat bagi Provinsi Riau menuju cita-cita bersama sebagaimana Visi Riau 2020, yakni

Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin di Asia Tenggara Tahun 2020.

Visi Riau 2020 intinya menjadikan Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Budaya Melayu di Asia Tenggara pada Tahun 2020. Tujuan pembangunan Provinsi Riau, sebagaimana Visi Riau 2020 yang akan dicapai tersebut, sejalan dengan pola dan kebijakan yang digunakan oleh masyarakat negara tetangga kita Malaysia, sehingga negara tersebut sudah cukup mapan saat ini. Guna mewujudkan program penanggulangan kemiskinan pembangunan infrastruktur, yang peningkatan Kemiskinan, Kebodohan, dan popularitas dengan sebutan Program Infrastruktur (K2-I) arah dan kebijakan Khusus masalah pengentasan kemiskinan, desa yang ditempuh antara melaksanakan program otonomi desa, pendekatan kewenangan, pemberian modal usaha dan redistribusi produktif dengan kepastian hukum. Selain itu, usaha pemberdayaan ekonomi desa dilakukan dengan mengedepankan konsep pemberdayaan desa dan kecamatan melalui bantuan modal usaha. Penyiapan pendampingan profesional, pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Lembaga Keuangan Mikro di tingkat desa dan kecamatan serta pengendalian dan pengawasan profesional.

Restribusi aset produktif kepada masyarakat miskin di bidang perkebunan dan usaha produktif lainnya seperti budidaya perikanan, peternakan, dan tanaman pangan (sawah). Sertifikasi lahan rakyat di bidang perkebunan, budidaya perikanan, peternakan, tanaman pangan serta aset lahan rakyat miskin pedesaan, dan pembangunan rumah sederhana layak

huni bagi masyarakat miskin Penanggulangan kerawanan pangan dilakukan dengan memfokuskan aktifitas dan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan melalui peningkatan produktifitas dan produksi serta peningkatan aktivitas ekonomi non pertanian di kawasan pedesaan secara simultan.

Yang tak kalah penting adalah, menyiapkan penataan ruang, penetapan, dan pengembangan produk unggulan. Pengembangan teknologi tepat guna mencakup peningkatan kualitas prasarana dan sarana produksi untuk menunjang penanganan kantong-kantong kemiskinan. Dilakukan pula upaya untuk mendorong berkembang nya usaha yang mendukung proses produksi, penanganan pasca panen, industri pengolahan, dan pemasaran hasil.

Meningkatkan keterampilan dan peran penyuluh teknis lapangan dalam mendukung proses pembangunan di pedesaan. Mengupayakan tertanggulangnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Riau.

Tabel 4.1. EKondisi penduduk miskin tahun 2002-2007 di Provinsi Riau

No	Referensi (Tahun)	Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
1.	2002	653,000	15.39
2.	2003	660,700	14.97
3.	2004	658,600	14.67
4.	2005	600,400	12.51
5.	2006	574,500	11.2

Sumber : BPS Provinsi Riau

Kegiatan-kegiatan prioritas lain yang perlu segera dilaksanakan untuk pengentasan kemiskinan meliputi:

1. bantuan modal usaha desa beserta instrumen operasionalnya;
2. sertifikasi lahan rakyat untuk masyarakat miskin;
3. penyediaan dana talangan padi;
4. pembangunan terminal agrobisnis;
5. pembangunan rumah sederhana layak huni;
6. pembangunan kawasan pemukiman budidaya perikanan
7. pembangunan kebun kelapa sawit.

4.1.1 Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan SDM merupakan langkah lain yang ditempuh Pemerintah Provinsi Riau dalam pengentasan kemiskinan. Dalam upaya mengatasi kebodohan (ketertinggalan SDM) antara lain, penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun melalui peningkatan daya tampung pendidikan dasar SD dan SLTP. Diikuti peningkatan daya tampung SMU dan SMK dengan penambahan keterampilan yang tepat dan berorientasi pasar kerja serta penciptaan lapangan usaha. Pendidikan dilakukan peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan dengan perbaikan fasilitas dan sarana pendukung dan kesejahteraan tenaga pengajar, pencapaian kurikulum, serta pemberian beasiswa bagi penduduk miskin terutama di wilayah terisolasi, kemiskinan, dan daerah marginal. Selain itu mendukung anusia sekolah yang memiliki potensi besar dan berprestasi melalui beasiswa prestasi Juga dilakukan penerapan standar pelayanan minimal pada semua jenjang pendidikan, men-

dukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang berorientasi pada pasar, pengembangan potensi, dan peluang daerah, serta menciptakan lulusan yang dapat diterima secara global.

Upaya memajukan pendidikan tidak bisa ditawarkan lagi sesuai apa yang menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Riau dan itu telah dituangkan dalam program Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K2-) yang salah satu di antaranya adalah mengejar ketertinggalan Sumber Daya Manusia (SDM). Dan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini memang sangat serius. Karena itu, telah disusun berbagai langkah langkah dan program dan juga anggaran.

Alokasi anggaran dan komitmen Pemerintah Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Rusli Zainal untuk membangun dunia pendidikan ditunjukkan dengan dianggarkannya dana untuk sector pendidikan sebanyak 24,5 persen dari total APBD Riau. Langkah ini juga diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota di Riau untuk menjadikan masalah kebodohan dan ketertinggalan di bidang pendidikan sebagai prioritas. Selain itu, dilakukan upaya mempromosikan dan engkampanyekan masalah pendidikan kepada masyarakat, teruma sekali pada masalah-masalah sains dan teknologi. Di samping peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan serta peningkatan mutu guru.

Dalam kaitan upaya pemerataan kualitas pendidikan, Riau sudah menyusun berbagai program kampanye pendidikan melalui koordinasi intensif dengan seluruh kabupaten/kota melalui satuan- satuan kerja (satker). Secara

teknis mereka lah yang akan melakukan pemetaan-pemetaan ini.

Salah satu grand strategy tentang rencana induk pendidikan Provinsi Riau, adalah masalah guru. Saat ini Riau masih kekurangan guru sebanyak 14.000 jika dilihat dari rasio jumlah sekolah, anak didik, dan guru. Menyangkut kompetensi tenaga kependidikan, Pemerintah Provinsi Riau juga sudah menyiapkan sebuah program kerja sama melalui Dinas Pendidikan dengan Depdiknas. Tahun 2007, dalam rangka meningkatkan kompetensi guru melalui pendidikan guru S1 sebanyak 1.000 orang, dan tahun 2006 sudah memberikan bea- siswa kepada guru sebanyak 300 orang.

Di samping itu, memberi perhatian terhadap kesejahteraan guru dengan alokasi anggaran Rp 80 miliar lebih. Semua itu, digunakan untuk mengedepankan pendidikan sebagai salah satu program pokok yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Tabel 4.2. Jumlah sekolah, guru, dan murid di setiap jenjang Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2007

No	Jenjang Pendidikan	Sekolah	Guru	Murid
1.	TK/RA	1.043	582	35.993
2.	SD/MI/PLB	3.534	21.081	731.048
3.	SMP/MTs	1.126	7.224	236.354
4.	SMA/MA/SMK	459	4,840	127,160

Sumber : *Dinas Pendidikan Provinsi Riau 2007*

Selain itu, juga diberikan jaminan kepada anak- anak yang berprestasi sesuai dengan kelanjutan pendidikan mereka. dan itu merupakan komitmen Pemerintah Provinsi

Riau dalam rangka meningkatkan kualitas SDM agar bisa bersaing di era global ini.

4.2.2 Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah Daerah Provinsi Riau menyadari betul oleh terutama yang dapat diakses keberadaan Untuk mengatasi kelangkaan semua lapisan masyarakat. dilakukan upaya menyusun Infrastruktur Riau untuk dua puluh tahun kedepan melalui pendekatan ruang, dan user (pengguna).

Langkah-langkah strategis yang dilakukan; menetapkan prioritas penanganan infrastruktur yang merupakan kewenangan provinsi dan sharing pembiayaan dengan kabupaten kota atau sebaliknya. Menetapkan prioritas penanganan infrastruktur kawasan pesisir, aliran sungai, kepulauan, dan daerah pedalaman yang terisolir.

Kedua, menetapkan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah perkotaan dan kawasan khusus, penyusunan prefeasibility study dan kelengkapan dokumen lainnya untuk dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Ketiga, mensinkronkan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan sektor ekonomi daerah dan pelayanan infrastruktur dasar. Strategi pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan adalah, membuka daerah terisolir dalam rangka peningkatan aksesibilitas, dan peningkatan produktifitas potensi yang ada (SDM, ekonomi, sosial, dan SDA).

Guna mengakomodasi beberapa kegiatan strategis di bidang infrastruktur, telah ditetapkan beberapa kegiatan

tahun jamak (multiyears) sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan Dumai-Sepahat-Seri Pakning sepanjang (108 km);
2. Pembangunan Jalan Sei Pakning-Teluk Mesjid- Simpang Pusako sepanjang 8 km);
3. Pembangunan Jembatan Teluk Mesjid sepanjang (1.500 meter);
4. Pembangunan Jalan Sei Akar Bagan Jaya sepanjang (65,75 km);
5. Pembangunan Jalan Bagan Jaya-Enok-Kuala Enok sepanjang (63 km):
6. Pembangunan Jalan Sorek Teluk Meranti km);
7. Pembangunan Jembatan Perawang (980 meter);
8. Pembangunan Bandara Tempuling;
9. Pembangunan Terminal Agribisnis;
10. Pembangunan jalan Simpang Kumu Sontang-Duri sepanjang (60 km):
11. Pembangunan Jalan Dalu-Mahato Menggala sepanjang (100 km).

Dalam upaya pembangunan infrastruktur ini akan ditempuh dua pola penyediaan pembiayaan, yakni pola investasi dan pola konvensional melalui dana APBD dan APBN).

Pola investasi akan diarahkan pada kegiatan- kegiatan yang meliputi, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kawasan industri Dumai, Kuala Enok, Tg. Buton, power plant (Duri). Peranap, dan Cerenti, air bersih, telekomunikasi, water front city (Pekanbaru dan Dumai. pabrik semen di Rohul, Kawasan Industri Tenayan, Pengembangan bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, dan lainnya.

Disisi lain, kegiatan-kegiatan prioritas yang perlu segera dilaksanakan untuk peningkatan SDM meliputi; (a) program pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya serta pengembangan, dan pengelolaan daerah rawa; (b) peningkatan dan pembangunan prasarana jalan dan jembatan (c) pembangunan Ro-Ro dan pelabuhan; (d) penyediaan dan pengelolaan air bersih.

Namun, keberhasilan usaha-usaha pembangunan di daerah sangat tergantung pada peran pemerintah, swasta, dan partisipasi masyarakat. Untuk itu, dikembangkan kemitraan yang sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dengan demikian penerapan good governance di Provinsi Riau telah mulai dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan melibatkan ketiga pilar yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

4.3 Gubernur Riau Anas Maamun Tahun 2014 - 2019



Annas Maamun dilantik menjadi Gubernur Riau pada 19 Februari 2014. Annas Maamun didampingi Arsyad Juliandi Rahman sebagai Wakil Gubernur diusung oleh Partai Golkar. Setelah melewati dua putaran Annas Maamun dan Arsyad Juliandi Rahman berhasil mendapatkan 1.322.237 suara atau 60,75 persen suara sah.

Pasangan ini mengusung visi yakni terwujudnya profinsi riau yang maju, masyarakat sejahtera, kebudayaan melayu dan budaya saing tinggi, menurunya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja dan pemantapan aparatur.

Terminologi dari visi tersebut di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

Maju : tersedia sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik, berkualitas serta berteknologi tinggi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sejahtera : terciptanya kondisi masyarakat yang makmur, aman dan nyaman serta merata dari segala aspek ekonomi, sosial, hukum, dan keamanan.

Bebudaya melayu yakni merupakan upaya terus menerus untuk menerapkan nilai-nilai budaya melayu sebagai jati diri dan menjadi roh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan dalam menjadikan profinsi riau sebagai pusat budaya melayu.

Brdaya saing : suatu kondisi pemerintah dan masyarakat yang tangguh, unggul dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang terhadap dinamika perubahan dan

tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya, lapangan sosial yang agamais.

Menurunnya kemiskinan : suatu kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.

Lapangan kerja : tersedianya peluang dan kesempatan bagi angkatan kerja melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pemantapan aparatur : meningkatkan profesionalisme dan etos kerja dalam memberikan pelayanan prima untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

Adapun misi gubernur anas makmum dan arsadjuliandi rahman adalah untuk pencapaian visi yang telah di tetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan serta memperhitungkan peluang yang di miliki maka terdapat sembilan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi riau 2014-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastuktur.
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan
4. Menurunkan kemiskinan
5. Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik

6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertakwa
7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan
8. meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata
9. meningkatkan peranswasta dalam pembangunan.

Ketika menjabat gubernur tahun 2014 dimana Provinsi rRiau terjadi kebakaran hutan dan lahan mencapai 60.000 hektar dan penderita ISPA lebih 60.000 orang.kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap berdasarkan kajian bank dunia mencapai Rp 20 triliun.

Annas Maamun cepat merespon hal tersebut, dengan membentuk Satuan Tugas kebakaran Hutan dan Lahan. Tujuannya untuk segera menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau.

Selain kebakaran hutan dan lahan Riau juga dilanda bencana banjir bandang. Banjir bandang mengakibatkan 210 rumah warga lima desa di Kecamatan Gunung Sahilan terendam banjir. Persoalan ini dapat diatasi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur ini.

4.4 Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman Tahun 2014-2019



Asyadjuliandi Rahman melanjutkan tugas sebagai Gubernur Riau.

Saat menjadi pelaksana tugas Gubernur, kebijakan yang bagus untuk perbaikan lingkungan hidup dan kehutanan dapat dijalankan. Prestasi saat jadi Gubenur antara lain:

1. Provinsi Riau dipilih sebagai lokasi audit oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) karena *hotspot* banyak. Audit dilakukan sejak Juni sampai Agustus 2014 meliputi 6 kabupaten dan kota serta 17 perusahaan. Sebanyak 12 perusahaan kehutanan dan 5 perkebunan. Dari 12 perusahaan kehutanan tersebut, 1 mendapat catatan sangat tidak patuh, 10 tidak patuh dan 1 lagi kurang patuh. Sementara 5 perusahaan perkebunan terdiri dari 1 dengan catatan sangat tidak patuh dan 4 perusahaan

tidak patuh. Temuan tim UKP4 ditindak lanjuti oleh Andi Rahman.

2. Pada November 2014, Presiden Jokowi melakukan blusukan ke Desa Sungai Tohor Kepulauan Meranti, Pada kunjungannya, Presiden menginstruksikan agar semua pihak memiliki niat kuat untuk menuntaskan masalah kebakaran lahan dan hutan di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau, yang sudah berlangsung selama 17 tahun. Jokowi mengatakan semua ini terjadi karena sistem yang tidak berjalan, ada proses pembiaran, negara tidak berperan maksimum melindungi lingkungan. Namun instruksi Presiden dijalankan oleh Gubernur Riau, dimana kebakaran hutan dan lahan terjadi lagi ditahun - tahun berikutnya.
3. Pada 19 Maret 2015 di Istana Bogor, dengan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo sebanyak 29 pimpinan Kementerian dan Lembaga menandatangani Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam di Indonesia (GNPSDA). Dalam kegiatan juga dilakukan deklarasi institusi penegak hukum (KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan TNI) dalam mendorong penyelamatan SDA di Indonesia. Gubernur Riau adalah satu dari 34 Gubernur yang ikut menandatangani renaksi GNPSDA. Tujuan renaksi GNPSDA adalah melakukan perlindungan hak rakyat atas SDA baik secara individu maupun kolektif melalui tatakelola yang baik, kepastian hukum, keterpaduan, sistem pengendalian korupsi, dan penguatan aspek keberlanjutan. Setidaknya ada 6 fokus dalam renaksi GNPSDA KPK yang berkenaan dengan perbaikan tata kelola kehutanan.

(1) *Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Penataan Ruang Dan Wilayah Administrasi* (2) *Penataan Perizinan Kehutanan Dan Perkebunan* (3) *Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat* (4) *Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan* (5) *Penguatan Instrumen Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Hutan* (6) *Membangun Sistem Pengendalian Anti Korupsi*

4. Plt Gubernur Riau , Arsyajuliandi Rahman, pada Februari 2015 menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) No 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Karhutla di Riau. Pergub ini terbit karena pada 2013 dan 2014 Riau dilanda karhutla. Inti Pergub, tahun 2015 Riau tanpa asap dengan melakukan serangkaian upaya pencegahan dan memperbaiki tata kelola kehutanan Riau.
5. Pada 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan terburuk di Riau. Sejak Juni-November 2015 ISPU selalu berada di level berbahaya, bahkan melebihi ambang batas ISPU. Akibatnya lima warga Riau meninggal akibat menghirup polusi kabut asap: tiga anak kecil dan dua orang dewasa. Masyarakat Riau berduka: Lebih dari 97.139 warga korban polusi kabut asap menderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) 81.514 orang, pneumonia 1.305 orang, asma 3.744 orang, iritasi mata 4.677 orang, iritasi kulit 5.899 orang . Bandara tutup hampir dua bulan dan Sekolah libur. Kebakaran terburuk sejak 18 tahun yang lalu diperparah karena Plt Gubernur baru menetapkan status Tanggap Darurat pada 14 September 2015, itupun setelah masyarakat Riau mendesak Presiden Jokowi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui media sosial.

6. Polda Riau menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 15 korporasi terlibat karhutla pada 2013 - 2015 yang terdiri dari: PT Bina Duta Laksana (HTI), PT Ruas Utama Jaya (HTI), PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia (HTI), PT Suntara Gajah Pati (HTI), PT Dexter Perkasa Industri (HTI), PT Siak Raya Timber (HTI), dan PT Sumatera Riang Lestari (HTI), PT Bukit Raya Pelalawan (HTI), PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam (HTI), PT Rimba Lazuardi (HTI), PT PAN United (HTI), PT Parawira (Perkebunan), PT Alam Sari Lestari (Perkebunan), dan PT Riau Jaya Utama, Dengan alasan kurang cukup bukti dan kebakaran terjadi di luar peta perusahaan. Selain itu, sumber api bukan berasal dari lahan perusahaan juga menjadi alasan kasus yang melibatkan perusahaan dihentikan. Api yang disinyalir berasal dari kebun warga dijadikan alasan penghentian tersebut.
7. Hasil temuan Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan HGU, Total perusahaan perkebunan kelapa sawit, Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dan kehutanan berjumlah 574 perusahaan. Dengan rincian; perkebunan kelapa sawit 288, PKS 121 perusahaan, kebun yang terintegrasi dengan PKS sebanyak 104 perusahaan. Sedangkan untuk kehutanan berjumlah 58 perusahaan IUPHHK-HT, 3 perusahaan IUPHHK-HA, 5 perusahaan IUPHHK-RE, 2 perusahaan IUPHHK- BK, 2 perusahaan pabrik pulp dan kertas, dan 12 izin pertambangan. Dari total 513 perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang memiliki izin pelepasan kawasan berjumlah 132 perusahaan. Sedangkan sisanya yaitu 378 perusahaan tidak memiliki

izin pelepasan kawasan. Hasil analisis temuan Pansus DPRD Riau, 33 korporasi melakukan penanaman kelapa sawit dalam kawasan hutan seluas 103.320 Hektar. Selain itu, juga melakukan penanaman kelapa sawit tanpa izin HGU seluas 203.977 hektar sehingga mengakibatkan kerugian negara sekira Rp2,5 Triliun. Koalisi Rakyat Riau telah melaporkan dugaan tindak pidana penggunaan kawasan hutan dan lahan secara illegal oleh 33 korporasi perkebunan kelapa sawit ke Polda Riau, terdiri dari: PT Hutaeen; PT Arya Rama Prakarsa; PT Adtya Palma Nusantara; PT Air Jernih; PT Eluan Mahkota; PT Egasuti Nasakti; PT Inti Kamparindo; PT Johan Sentosa; PT Sewangi Sawit Sejahtera; PT Surya Brata Sena; PT Peputra Supra Jaya; PT Inecda Plantation; PT Ganda Hera Hendana; PT Mekarsari Alam Lestari; PT Jatim Jaya Perkasa; PT Salim Ivomas Pratama; PT Cibaliung Tunggal Plantation; PT Kencana Amal Tani; PT Karisma Riau Sentosa; PT Seko Indah; PT Panca Agro Lestari; PT Siberida Subur; PT Palma Satu; PT Banyu Bening Utama; PT Duta Palma Nusantara; PT Cirenti Subur; PT Wana Jingga Timur; PT Perkebunan Nusantara V; PT Marita Makmur; PT Fortius Agro Wisata; PT Guntung Hasrat Makmur; PT Guntung Idaman Nusa; dan PT Bumi Palma Lestari Persada.

8. Pada 31 Maret 2016, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menerbitkan SK Kpts.350/III/2016 sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubri Nomor Kpts.539/V/2016 tentang Tim Restorasi Gambut di Provinsi Riau.

Dengan tujuan mendukung restorasi gambut yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut. Pada 25 Mei 2016 Arsyadjuliandi Rahman dilantik menjadi Gubernur Riau Defenitif. Saat menjadi Gubernur Riau Defenitif mencatat ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan sebagai berikut:

1. Pada 2016, Gubernur Riau menyerahkan draft RTRWP 2016-2035 kepada DPRD Propinsi Riau. Dalam penyusunan draf RTRWP 2016 - 2035.
2. Oktober 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Tim Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo. Tujuannya untuk menyelesaikan konflik dalam Ekosistem Tesso Nilo berbasis masyarakat. Dalam tim Operasional RETN, Gubernur Riau merupakan pengarah agar penyelesaian konflik ini segera dilakukan. Tiga tahun berjalan, penyelesaian konflik mengalami kemajuan dimana dari 250 cukong yang menguasai lahan dalam Ekosistem Tesso Nilo dapat diterbitkan.
3. Pada 9 Desember 2016, Hari Anti Korupsi Sedunia di peringatidiRiau. TerpilihnyaRiausebagaituanrumah HAKI 2016 ada beberapa pertimbangan, Provinsi Riau memiliki komitmen untuk bertransformasi menjadi provinsi yang unggul dalam pembangunan budaya integritas dan terdepan dalam setiap upaya pencegahan korupsi melalui internalisasi nilai-nilai profesional, religius dan integritas.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau memberikan penghargaan pencegahan dan

penanggulan karhutla kepada PT RAPP (APRIL, RGE Grup) dan Sinarmas Grup.

5. Sepanjang 2018 terjadi konflik satwa dan manusia yang mengakibatkan 2 orang meninggal diterkam Harimau. Hal ini terjadi karena ruang bagi satwa tidak ada lagi. Korban ditemukan meninggal didalam konsesi PT Tabung telah Haji Indo Plantation. Gubernur Riau memerintahkan dinas terkait untuk memerintahkan melakukan review amdalnya sesuai. PT THIP merupakan salah satu perusahaan yang ditemukan Pansus Monev Perizinan DPRD Riau yang menanam diluar HGU dan berada di Kawasan Hutan.
6. Pada 14 Februari 2018 Gubernur Riau menandatangani SK Kelompok Kerja Perhutanan Sosial. Tujuannya untuk melakukan percepatan capaian Perhutanan Sosial di Riau. Namun sampai akhir 2018 ada bekerja. Dapat dilihat realisasi PS di Riau sampai Desember 2018 baru 88.009 hektar.

Dimasa kepemimpinan Gubernur Riau Ir. Ary-adjuliandi Rachmat, MBA dan Wakil Gubernur Wan Thamrin Hasyim untuk mewujudkan Visi Riau 2020 dengan melaksanakan Riau Home Land of Malay dengan membangun pariwisata berbasis budaya guna mewujudkan Visi Riau 2020. Pemerintah Riau genjar-genjarnya melaksanakan melaksanakan promosi sejumlah potensi pariwisata yang ada diberbagai daerah di Riau.

Mulai dari event pariwisata tahunan seperti pacu jalur di Kuantan Singingi, Bakar Tongkang di Rokan Hilir, Wisata

religi seperti Islamic Center di Kabupaten Rokan Hulu, wisata sejarah seperti di kota tua senapelan, Kerajaan Siak Sri Indrapura dan lain sebagainya.

Termasuk sejumlah wisata alam yang menjadi penarik wisatawan yakni pesona pulau rupert di Kabupaten Bengkalis, Taman Nasional Rimbang Baling dikabupaten Kampar, Ombak Bono di Kabupaten Pelalawan serta Puncak Ulu Kasok kabupaten Kampar.

Pariwisata menjadi sektor andalan bagi pendapatan daerah. Diluar sektor andalan kelapa sawit dan minyak dan gas bumi yang sudah lama menjadi penopang terhadap keberlangsungan perekonnomian di Provinsi Riau, Dimana, sektor kelapa sawit dan minyak dan gas bumi tak selama dinikmati masyarakat, untuk itu harus disiasati agar perekonomian di Provinsi Riau tetap hidup. Salah satunya dengan mengembangkan industri pariwisata.

Tak hanya melakukan pengembangan pariwisata saja, tetapi lebih dari itu, ada hal yang lebih krusial yang kini sedang dibenahi oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Upaya ini dengan melakukan sejumlah pembangunan akses dan infrastruktur sebagai upaya pengembangan potensi pariwisata di Riau.

Tentu saja, upaya ini memiliki dampak positif terutama bagi masyarakat yang tinggal dilokasi obyek pariwisata. Misalnya, dalam pembukaan jalan menuju obyek wisata. Dimana, sekaligus membuka dan memperbaiki jalan untuk masyarakat tempatan.

Menarik sekali, dimana Pemerintah kabupaten dan kota bersinergi dalam menjalankan pembangunan khususnya

pariwisata. Dengan adanya dukungan dan pengakuan atas pariwisata dan kuliner dan ekonomi kreatif, sehingga wisatawan maupun mancanegara berlomba-lomba datang ke Provinsi Riau. Potensi dijual melalui event dan destinasi dan pariwisata, sehingga jangan terlena atas Migas dan perkebunan yang tetap didorong. Tapi, punya potensi atas pariwisata. Misalnya, Pelalawan, Rokan Hilir Jenis pariwisata yakni pariwisata budaya, alam, mangrove, sungai, olahraga, agro pantai.

Program Riau Home Land of Malay dengan membangun pariwisata berbasis budaya guna mewujudkan Visi Misi Riau 2020 dimana meningkatkan sektor pariwisata maka Pemerintah Provinsi Riau harus mengoptimalkan dengan serius media promosi hingga ke manca negara, sehingga memancing daya tarik wisata wisatawan manca negara.

Berdasarkan data maka jumlah wisatawan yang mengunjungi Riau masih sedikit dibandingkan dengan Provinsi tetangga yakni Sumatera Barat. Ini juga justru memperbaiki citra Provinsi Riau yang banyak dikenal masyarakat dalam maupun luar negeri dengan masalah-masalah asap dan kebakaran hutan dan lahan.

Termasuk, Program Riau menyapa dunia bukan saja hanya sekedar cerita tapi harus mampu diwujudkan demi menaikkan nama Provinsi Riau yang lebih baik dan menghilangkan stigma negatif tentang Provinsi Riau melalui Pariwisata.

Walaupun pariwisata sudah digalakkan oleh Pemprov Riau, tetapi juga harus tambah dengan wisata sawit dan migas. Misalnya, wisata buku sawit atau migas, wisata

produk turunan sawit, wisata pengolahan migas dan lain-lain.

Sawit dan Migas Riau dari Riau. Hal itu tidak bisa dipisahkan, Riau diciptakan bukan seperti Sumatera Barat yang memiliki destinasi wisata yang sangat banyak maupun Bali yang memiliki Destinasi wisata yang sangat indah dan bahkan diakui dunia. Tapi, Riau yang dikarunia sawit yang sangat Produktif dan migas yang sangat banyak.

Dengan dilakukan Pariwisata dengan ciri khas Riau yakni sawit dan migas maka sangat besar kemungkinan bahwa sektor pariwisata meningkat, industri sawit meningkat dan migas pun meningkat.

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan tahun 2017 yakni pembangunan sejumlah jembatan dan jalan di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Contoh, Pemerintah Provinsi Riau membangun pesisir pelalawan menuju Teluk Mesjid. Pesisir akan dirangkai dan daratan Sumatera juga akan dirangkaikan dengan mencari titik akses yang lebih cepat. Seperti, akses menuju Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Roro ataupun transportasi penye berangan lainnya guna mendukung arus mobilitasasi baik manusia dan barang. Termasuk, infrastruktur yang didanai oleh APBD setelah disetujui oleh DPRD Riau maka digunakan untuk infrastrukrur khususnya jalan khususnya jalan untuk membuka jalan baru didaerah terisolir dan jalan lanjut antara kabupaten satu dengan yang lainnya untuk memberikan jarak tempuh khususnya bagi daerah terisolir.

Di Provinsi Riau terdapat dua daerah terisolir yakni di Rimbayung yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu, namun didaerah tersebut sudah ada jalan dan jembatan,

sehingga dekat dengan provinsi tetangga. Untuk itu, kita bangun jembatan dan jalan. Kedua, daerah yang menghubungkan antara Bagan Siapi-Api Kubu dan Panipahan menggunakan transportasi laut. Daerah dibuka untuk membantu masyarakat disana di dalam bidang transportasi.

Dari tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 kenaikan atas jalan baik dimana jalan kurang baik 14,66 Kilo meter. Rusak sedang 576 kilometer, rusak ringan 401,51 kilometer. Fokus kepada jalan agar masyarakat dapat menggunakan jalan untuk berbagai kegiatan.

4.5 Gubernur Wan Thamrin Hasyim



Wan Thamrin Hasyim dilantik menjadi Gubernur Riau definitif pada 10 Desember 2018. Selama menjabat menjadi Gubernur Riau beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Wan Thamrin Hasyim bagi kesejahteraan masyarakat

1. Pada 19 Februari 2018 Wan Thamrin menerbitkan Perda No 6 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkebunan.
2. Pada 8 Mei 2018 Wan Thamrin menerbitkan Perda 10 tahun 2018 tentang RTRWP Riau 2018 – 2038. Perda 10 tahun 2018 diterbitkan tanpa.
3. pada 22 Mei 2018 Wan Thamrin Perda No 14 tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4.6 Gubernur Riau di Era Syamsuar dan Edi Natar Nasution 2019 sampai dengan 2024



Visi : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu).

Misi :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing Global Melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya.
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing
4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi.

LKPJ Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari RPJM Daerah Tahun 2019-2024 dan tahap kelima RPJP Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 yang memerlukan adanya keberlanjutan seluruh program yang telah direncanakan. Dalam RPJM Daerah tersebut, dijelaskan Visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU).”

Terminologi dari visi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdaya Saing	:	Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari.
Sejahtera	:	Kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.
Bermartabat	:	Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan falsafah budaya Melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.
Unggul	:	Menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi serta permasalahan yang dihadapi, tantangan dan ancaman ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka

ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2019-2024 sebagai berikut:

1. Misi Pertama, Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya, dengan tujuan sebagai berikut:
 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman.
2. Misi Kedua, Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dengan tujuan sebagai berikut:
 1. Meningkatkan kualitas infrastruktur;
 2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Riau Hijau).
3. Misi Ketiga, Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, dengan tujuan sebagai berikut:
 1. Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing.
4. Misi Keempat, Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing, dengan tujuan sebagai berikut:
 1. Meningkatkan pemajuan Budaya Melayu;
 2. Meningkatkan nilai tambah pariwisata.

5. Misi Kelima, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi, dengan tujuan sebagai berikut:
 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Lima misi Provinsi Riau tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2019-2024. Guna pencapaian sasaran indikator RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, empat sasaran indikator memerlukan dukungan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau untuk mencapainya. Oleh karena itu, pencapaian target indikator kabupaten/kota diarahkan untuk memenuhi capaian target indikator Provinsi Riau. Keempat sasaran indikator yang ditetapkan bagi kabupaten/kota antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi;
2. Tingkat Kemiskinan;
3. Tingkat Pengangguran;
4. Indeks Pembangunan Manusia.

Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Riau selain pencapaian tujuan dan sasaran dalam visi dan misi juga memperhatikan:

1. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional;
2. Pencapaian periodisasi RPJP Provinsi Riau tahap ke-4;
3. Pengembangan potensi dan keunggulan daerah;

4. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang dirangkum dalam isu strategis daerah.

Adapun pendekatan yang diterapkan dalam menyusun strategi dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan *money follow programme*;
2. Pendekatan *Tematic, Holistic, Integrative and Spasial* (THIS).

Implementasi strategi dilakukan dengan proses yang partisipatif, komprehensif dan administratif secara sinergis, terintegrasi, bertahap dan berkesinambungan. Isu strategis yang masih belum dapat diselesaikan secara tuntas akan menjadi prioritas program pembangunan secara bertahap pada tahun berikutnya. Isu yang dimaksud mencakup :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berdaya Saing;
2. Peningkatan kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan;
3. Peningkatan Produktifitas Sektor Unggulan yang Berdaya Saing dan Penanggulangan kemiskinan;
4. Peningkatan Perlindungan dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau dan Pengembangan Pariwisata;
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi.
 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan pembangunan berwawasan

- lingkungan;
2. Peningkatan produktivitas sektor unggulan yang berdaya saing dan penanggulangan kemiskinan;
 3. Peningkatan perlindungan dan pengembangan pemajuan kebudayaan melayu Riau dan pengembangan pariwisata.
 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi

Oleh karena itu untuk menjawab dan menanggulangi permasalahan dan isu strategis tersebut maka perlu dilakukan kebijakan dan strategi untuk setiap misi seperti yang terlihat pada tabel berikut;

Tabel III
Strategi dan Arah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi I : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya				
1.1	Meningkatkan kualitas SDM yang bersaing	Meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat	Peningkatan Akseibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dari mendorong pengembangan pendidikan vokasi
				Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik

				Meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan berdampak krisi kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa.
				Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan.
				Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
			Peningkatan budaya olahraga masyarakat dan prestasi olahraga.	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan dan pengelolaan ke olahraaan.
		Meningkatnya kesetaraan gender	Peningkatan pengurus taman gender	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan

				Meningkatkan Perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.
				Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup.
1.2	Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Peningkatan pemahaman dan pengalaman agama dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan pemahaman dan pengalaman agama dalam kehidupan bermasyarakat.
				Meningkatkan pembangunan dan pelayanan sarana keagamaan
			Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	Meningkatkat peran dan fungsi kelembagaan kewaspadaan dini
				Meningkatkan wawasan idiologi kebangsaan

Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Intrastuktur Daerah yang merata Berwawasan lingkungan yang Merata Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan				
2.1	Meningkatkan kualitas infastruktur	Meningkatnya pelayanan transportasi	Pembangunan konektivitas	Memantapkan jalan dan jembatan
				Mengembangkan system jaringan transpor-tasi yang terintegrasi.
		Meningkatnya cakupan pelayanan insfrastruktur pemukiman	Peningkatan cakupan pelayanan air minum	Meningkatan ketersediaan air bersih
			Peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat	Membangun sarana dan prasarana sanitasi
			Penanganan kawasan kumuh permukiman.	Meningkatkan infastruktur kawasan pemukiman kumuh
		Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga.	Peningkatan akses ketenaga listrikan	Meningkatkan akses dan infastruktur energy keseluruhan wilayah
				Mempercepat penyediaan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber energy baru dan terbarukan

		Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Peningkatan pengaturan air dan penanganan abrasi/banjir	Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir
2.2	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (RIAU HIJAU)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan konservasi sumber daya alam dan keaneka ragaman hayati	Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan
				Meningkatkan pengelolaan pra berencana tanggap bencana dan pasca bencana
				Meningkatkan peme; Pemeliharaan dan pemanfaatan keaneka ragaman hayati(KEHEATI) secara berkelanjutan
				Meningkatkan kualitas pengelolaan. sumber daya pesisir laut dan DAS
		Menurunnya emisi gas rumah kaca	Peningkatan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim	Menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau

				Memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegrasi / tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi.
Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif , mandiri dan berdaya Saing				
3.1	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dsn berdaya saing	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan esenjangkan pendapatan	Peniingkatan daya saing Sektor unggulan	Meningkatkan produksi hasil industry
				Meningkatkan produksi pertanian
		Meningkatkan investasi daerah	Peningkatan daya tarik investasi	Memperbaiki iklim dan formasi investasi
		Meningkatkan ketahanan-pangan daerah	Peningkatan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	Menjamin distribusi keamanan kualitas bahan pangan
		Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin.
			Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat desa	Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa

			Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja
			Peningkatan kewirausahaan pemuda	Meningkatkan kompetensi wirausaha muda.
Misi 4 : Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang berdaya saing				
4.1	Meningkatkan pemajuan Budaya Melayu	Meningkatnya Kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan perlindungan, pengembangan pemanfaatan dan pembinaan	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Mealayu Riau.	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau.
4.2	Meningkatkan nilai tambah	Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara	Peningkatan pengelolaan destinasi wisata	Meningkatkan akseibilitas destinasi wisata
		Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara	Peningkatan promosi pariwisata	Meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang prima berbasis Teknologi Informasi.				
5.1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih transparan dan akuntable	Meningkatnya penerapan informasi birokrasi	Peningkatan penataan dan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birograsi secara berkelanjutan

				Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan
				Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan.
		Meningkatnya penerapan e - Government	System pemerintah berbasis elektronik	Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan publik
				Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana dan system teknologi informasi

capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan

Berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan, daerah, menyatakan bahwa tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/ kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pada hakekatnya dalam pelaksanaan tugas pembantuan gubernur berfungsi sebagai kepala daerah karena tugas pembantuan diberikan kepada daerah bukan kepada Wakil pemerintah pusat di daerah. Pada tingkat provinsi penugasan

kepada Kabupaten/ kota ditetapkan berdasarkan dengan peraturan Gubernur. Selanjutnya pada tingkat kabupaten/ Kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah (kabupaten/ kota) daerah berhak untuk menetapkan suatu kebijakan daerah dalam menyelenggarakan tugas pembantuan di daerah.

Dari sisi anggaran, dokumen anggaran untuk melaksanakan tugas pembantuan daerah disampaikan oleh kepala daerah sebagai unsur penerimaan tugas pembantuan kepada DPRD dalam dokumen yang terpisah, sedangkan laporan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan disampaikan oleh Gubernur kepala daerah sebagai unsur penerima tugas pembantuan kepada DPRD bersama dengan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah dalam dokumen yang terpisah.

A. TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum

Penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah provinsi Riau memiliki dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-undang 3 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaga negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir undang-undang no tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaga negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58

- tambahan lebaran negara Republik Indonesia Nomor 5 6 7 9);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 8 16);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 16 nomor 114)
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 73);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri seri nomor 65 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan provinsi dan pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan kabupaten/kota.
 - g. Peraturan Menteri Keuangan nomor 156 tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah ah provinsi kepada pemerintah Kabupaten Kota dan pemerintah Desa dan dari Pemerintah kabupaten kota kepada Pemerintah desa.

2. Instansi pemberi tugas pembantuan

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Riau pada tahun 2019 berasal dari 5 kementerian yaitu;

1. Kementerian Pertanian;
2. Kementerian Sosial;
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Kementerian desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Adapun jumlah alokasi dana tugas pembantuan secara keseluruhan yang diterima oleh pemerintah provinsi Riau sebesar Rp. 104. 980. 678.000, merealisasi keuangan sebesar Rp. 94.210.138.875,- atau 89,74% dandi alisasi fisik 93,20%.

3. Satuan kerja Perangkat daerah yang melaksanakan.

Pelaksanaan tugas pembantuan pada pemerintah provinsi Riau tahun 2019 terdiri dari 6 (enam) OPD, yakni:

- a. Tanaman pangan, hortikultura dan perkembangan provinsi Riau;
- b. Dinas Peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Dinas sosial provinsi Riau
- d. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Riau
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
- f. Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan yang di terima oleh Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 (Lihat Table IV-1)

Tabel IV -1
Rekapitulasi Dana Tuigas Pembantuan Tahun 2019

No.	Kementerian	OPD Pelaksanaan	Jumlah Pagu Dana	Realisasi Keuangan		Fisik
			(Rp)	(Rp)	%	%
1	Kementarian Pertanian	Dinas tanaman pangan hortikultural dan perkebunan Provinsi Riau	39.795.493.000	34.502.041.193	86,70	89,74
		Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Riau	7.565.987.000	7.384.657.711	97,60	100
2	Kementrian Sosial	Dinas social Provinsi Riau	77.060.000	75.320.000	97,74	100

3	Kemendrian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau	23.060.196.000	22.500.2888.850	97.57	99.85
4	Kemendrian Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	2.180.545.000	2.152.675.947	98.72	100.00
5	Kemendrian Lingkungan hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Riau	32.301.397.000	27.595.155.174	85.43	90.65
JUMLAH			104.980.678.000	94.210.138.875	89.74	93.20

4. Program yang diterima dan pelaksanaannya.

Pemerintah provinsi Riau tahun melaksanakan tugas pembantuan dengan program dan kegiatan sebagai berikut;

a. Dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan provinsi Riau Program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima:

1). Program peningkatan produksi, produktivitas

dan mutu hasil tanaman pangan dengan total anggaran sebesar Rp. 11.844.800.772,- dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 11.498. 844. 013,- atau 97.08% dan Realisasi fisik 99,46% dengan kegiatan;

- a. Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi, pagu anggaran Rp. 210.000.000,- realisasi keuangan mencapai Rp.191.611/50,- atau 94,52%;
- b. Pengelolaan produksi tanaman serealia, pagu anggaranRp. 2.766.275.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp hai. 2.728.900.069,- atau 99.74% dan realisasi fisik 99,74 %
- c. Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan pagu anggaran Rp. 5.564.105.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 5.561.203.783,- atau 99.95% dan Realisasi fisik 100 %,-
- d. Dukungan manajemen dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Dirjen tanaman pangan,pagu anggaran Rp. 758.000.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. Hai 726.412.511,-natau 95.83% dan realisasi fisik 96.06%.
- e. Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan pagu anggaran Rp. 2.546.420.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp.

2.290.751.900,- atau 89,96% dari realisasi fisik 99,39%,

- 2) Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura dengan total anggaran sebesar Rp. 6.434.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.084.464.552,- atau 94.56% dan Realisasi fisik 94.56%, dengan kegiatan:
 - a. Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat paku anggaran Rp. 3.565.000.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 3.414.273.610,- atau 95,77% dan realisasi fisik 97.77%;
 - b. Peningkatan usaha dukungan manajemen dan text pada Dirjen hortikultura paku anggaran Rp. 360.000.000,- realisasi keuangan mencapai Rp. 344. 758.300,- atau 95.77% dan Realisasi fisik 95.77%.
 - c. Peningkatan produksi buahan dan florikultura Paku anggaran Rp. 1.109.750.000,- dengan realisasi keuangan capai Rp. 983.690.010,- atau 86.84%.
 - d. Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura paku anggaran Rp 1.400.000.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 1. 361. 742. 632,- atau au 97.27% dan Realisasi fisik 97,27%

- 3) Program peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan dengan total anggaran sebesar Rp ar. 4.743.803.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.313.114.000,- atau 69.84% dan Realisasi fisik 89.17% dengan kegiatan :
- a. Perkembangan tanaman tahunan dan penyegar pagu anggaran Rp.1.609.250.000,- dengan real- isasi keuangan mencapai Rp. 356.700.000,- atau 22,17 % dan Realisasi fisik 60.00%.
 - b. Dukungan perlindungan perkebunan pagu anggaran Rp. 297.050,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 297.044.000,- atau 100% dan Realisasi fisik 100%.
 - c. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan pagu anggaran Rp.838.727.000,- atau 100% dan Realisasi fisik 100%;
 - d. Pengembangan tanaman semusim dan rempah pagu anggaran Rp. 343.750.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 343.605.300,- atau 99,96% dan Realisasi fisik nya 100%
 - e. Dukungan pengolahan dan pemasaran Hasil tersebut pagu anggaran Rp. 1.295.415.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.284.479.750,- atau 99,16% dan Realisasi fisik 100%.

- f. Dukungan pembenihan tanaman perkebunan pagu anggaran Rp. 359.611.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp.220.028.000,- atau 61.19% dan realisasi fisik 75,00 %
- 4) Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dengan total anggaran sebesar RP, 16.772140.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.838.180.578,- atau au 82,51% dan Realisasi fisik 82,51% dengan kegiatan;
- a. pengelolaan air irigasi untuk pertanian pagu anggaran Rp. 1.580.000.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 1. 576.680.000,- atau 99.79% dan realisasi fisik 99.79%;
 - b. Perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pagu anggaran Rp.150.000.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp.150.000.000,- atau 100% dan Realisasi fisik 100%;
 - c. Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian pagu anggaran Rp. 6.319.600.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 4.023.943.535,- 63.67% dan Realisasi fisik 63,67%;
 - d. Hubungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen prasarana dan sarana pertanian, pagu anggaran Rp. 5.761.930.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp.

5.378.986.043,- atau 93.35 % dan Realisasi fisik 93.35%

- e. Fasilitas pupuk dan pestisida lagu anggaran Rp. 2.061.600.000,- dengan realisasi keuangan men- capai Rp. 1.957. 253.000,- atau 94,94% dan Real- isasi fisik 94,94%;
- f. Fasilitas pembiayaan yang pagu anggaran sebe- sar Rp. 899.010.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp hai. 751.318.000,- atau 83,57 % dan Realisasi fisik 83,57%.

b. Dinas Peternakan dan kesehatan hewan provinsi Riau
Program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima adalah sebagai berikut;

- 1. Program pemenuhan pangan asal ternak dan Agri bisnis peternakan rakyat dengan kegiatan;
 - a, tingkatan produksi pakan ternak, pagu Anggaran Rp. 1.262.550.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.242.993.429,- atau 98,45% dengan realisasi fisik 100%
 - b. Pengendalian dan dan penanggulangan pen- yakit hewan, pagu anggaran Rp.1.310.000.000,- dengan realisasi keuangan uang mencapai Rp.1.254.207.000,- atau 95,74% dari realisasi fisik 100%;
 - c. Penyediaan benih dan bibit serta pening- katan produksi ternak, pagu anggaran

Rp.3.473.005.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp.3.452.843.443,- atau 94,41% dan realisasi fisik 100%;

- d. Peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal), pagu anggaran Rp. 447.000.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp 426.751.000,- atau 95.47% dan Realisasi fisik 100%.
- e. Hubungan manajemen dan dukungan teknis lainnya peranakan pagu anggaran Rp an. 668.232.000,- dengan realisasi keuangan menca- pai Rp. 635.120.002,- atau 95.04% dan Realisasi fisik 100%;
- f. Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak pagu anggaran Rp.405,200.000,- dengan realisasi keuanggan mencapai Rp. 372.742.837,- atau 91,98% dan Realisasi fisik 100%.

c. Dinas Sosial Provinsi Riau

Program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima adalah program pemberdaan sosial dengan kegiatan;

Pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) pagu an- ggaran Rp.77.060.000 dengan realisasi keuangan menca- pai Rp. 75.320.000 atau 97.74% dengan realisasi 100%.

d. Dinas pekerjaan umum umum dan penataan ruang provinsi si Riau

Program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima adalah sebagai berikut:

1. Program pengelolaan sumber daya air (SDA) dengan kegiatan operasi dan dan pemeliharaan prasarana SDA, pagu anggaran Rp. 10.853.331.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. Mad 10.852.049.000,- atau 99,99% dan Realisasi fisik 100%.
2. Program penyelenggaraan jalan dengan kegiatan:
Browser Fasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional pagu anggaran Rp.12.206.865.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 11.643.242.850,- atau 95,42% dan Realisasi fisik 99,70%

e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima adalah berikut:

- 1) program pengendalian pencemaran dan perusakan dengan kegiatan:
 - a. Rapat rutin lagu Anggaran Rp.79.090.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 17.360.000,- atau 21,95% dan realisasi fisik 65,95%;
 - b. Koordinasi dan konsolidasi restorasi gambut pagu anggaran Rp. 906.364.000,- dengan

- realisasi keuangan mencapai Rp. 5961.849,- atau 65,82% dan Realisasi fisik 66.90%;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan restorasi gambut, pagu anggaran Rp. 1.020.432.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 652.070.000,- atau 63.90% dan realisasi fisik 72,90%;
 - d. Pengelolaan program dan pendukung kegiatan pagu anggaran Rp. 2.270.910.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.146.667.250,- atau 94,53% dan Realisasi fisik Rp. 97,53%.
 - e. Persiapan PIPG, pagu anggaran Rp. 1,242.885.178,- atau 77.06% realisasi fisik 87,06% ;
 - f. Pembangunan sumur bor, pagu anggaran Rp. 5.440.277.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 4.500.386.600,- atau 82.72% dan Realisasi fisik 92.79%;
 - g. Pembangunan sekat, pagu anggaran Rp. 8.589.947.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 7.361.176.540,- atau 85,70% dan Realisasi fisik 92,70%;
 - h. Demplot revegetasi lahan gambut bekas terbakar pagu anggaran Rp. 1.315.803.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.164.196.832,- atau 88.48% dan Realisasi fisik Rp. 88,48%;

- i. Pelaksanaan supervisi dalam KOP infrastruktur di lahan gambut Pagu anggaran Rp. 438.803.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 194.074.700,- atau 55,23% dan Realisasi fisik 61,45%;
 - j. Pembangunan kapasitas teknis masyarakat desa, pagu anggaran Rp. 787.070.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 609.471.625,- atau 77,44% dan Realisasi fisik Rp. 78,45%;
 - k. Revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat, pagu anggaran Rp. 8.349.783.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 8.044.959.400,- atau 96,35% dan Realisasi fisik 97,35%;
 - l. Verifikasi dan monitoring IPG, pagu anggaran Rp. 1.065.357.200,- atau 71,50% dan Realisasi fisik 71,89%.
5. Sumber dan jumlah anggaran
- a. Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi Riau dengan anggaran sebesar Rp. 47.361.480.000,- atau 45,11% dari total dana tugas pembantuan tahun 2019
 - b. Kementerian Sosial
Kementerian Sosial memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah

provinsi Riau dengan anggaran sebesar Rp. 77.060.000,- atau 0,07% dari total dana bantuan tahun 2019.

- c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi Riau dengan anggaran sebesar Rp. 23.060.196.000,- atau 21,97% dari total dana tugas pembantuan tahun 2019.

- d. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian desa, pembangunan Daerah terting- gal dan Transmigrasi memberikan tugas pemban- tuan kepada pemerintah provinsi Riau dengan anggaran sebesar Rp. 2.180.545.000,-atau 2,08% tugas pembantuan tahun 2019.

- e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi Riau dengan anggaran sebesar Rp.32.301.397.000,- atau 30,77% dari total dana tugas pembantuan tahun 2019

B. Hambatan/ permasalahan dalam melaksanakan tugas pembantuan

Tugas pembantuan tahun 2019 yang diterima oleh pemerintah provinsi Riau telah dapat dilaksanakan secara optimal, namun ada beberapa permasalahan yang muncul dari OPD tugas pembantuan antara lain ;

- 1) dinas tanaman pangan hortikultura dan perkembangan provinsi Riau
 - a. Penurunan lahan produktif pertanian akibat tingginya alih fungsi lahan;
 - b. Pantai tata Niaga tanaman pangan hortikultura terutama jagung dan kedelai sehingga menyebabkan produksinya tidak terserap oleh pasar secara optimal.
- 2). Kesehatan hewan Provinsi Riau
 - a. Masih kurang memadainya sarana prasarana dan faktor penunjang lainnya sehingga menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan program upaya khusus sapi indukan wajib bunting (UPSUS SIWAB);
 - b. Terbatasnya sumber daya manusia petugas lapangan seperti petugas inseminator yang memiliki sertifikasi kompetensi, dan petugas pemeriksaan kebuntingan (PKB) yang bertugas untuk mendukung program upaya khusus sapi indukan wajib

bunting (UPSUS SIWAB) secara langsung di lapangan.

3) Dinas Sosial Provinsi Riau

Tidak ada permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program atau kegiatan di dinas sosial provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Sosial.

4) Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Riau

Tidak ada permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program atau kegiatan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Tidak ada permasalahan yang berarti; program atau kegiatan di dinas tenaga kerja dan Transmigrasi provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

6). Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Provinsi Riau belum optimalnya perencanaan di badan restorasi gambut (BRG) dalam pelaksanaan kegiatan restorasi gambut di provinsi Riau.

- C. Upaya penyelesaian
1. Dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan provinsi Riau
 - A. Mendorong kabupaten / kota untuk menyusun dan menetapkan Peraturan daerah tentang perlindungan lahan pangan.
 - B. Mendorong pembentukan kelembagaan petani khusus kelompok usaha bersama dan kelompok ekonomi petani sebagai tempat penampungan hasil produksi petani sehingga mendapatkan nilai tambah hasil produksi.
 2. Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Riau
 - a) Meningkatkan sarana, prasarana dan faktor penunjang lainnya guna mendukung pelaksanaan program upaya khusus sapi induk wajib bunting (UPSUS SIWAB) menjadi lebih optimal;
 - b) Meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi kompetensi dan petugas inseminator dan petugas pemeriksa kebuntingan untuk mendukung program upaya khusus sapi indukan wajib bunting (UPSUS SIWAB)
 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Koordinasi perencanaan dengan badan restorasi gambut dalam pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solihin, 2012 Analisis kebijakan dan formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. *Bumi Aksara, Jakarta.*
- Abdul Wahab Solihin 2005, Analisis Kebijaksanaan dari formulasi Keimplementasi Kebijakan Sunan Hegma *Jakarta : Bumi Aksara, Jakarta.*
- Agustino Komaleo 2014 *Dasar-Dasar Kebijakan Publik afabeta, Bandung.*
- Amri Marzali. *Budaya atau Kebudayaan Cara Menerjemahkan Konsep Culture.* Wacana Antropoogi Tahun II No 3. Nopember - Desember 1998:7-9.
- Deter Mack. *Kritik dan Apresiasi Masyarakat terhadap Musik.* DAAD Bulletin October 1993. No. 4:33 - 35.
- Efendi, Tenas. 2004 *Tunjuk Ajar Melayu Tenas Press*
- Dahril, Tengku. 2011 *visi riau 2020*
- Enceng mohtar evaluasi kebijakan publik, unpad pers 2012
- Enceng, Kepemimpinan Universitas terbuka 2016
- Hans JK. Daeng. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan. Tinjauan Angropologis.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2000:341.
<https://sumatra.bisnis.com/read/20191204/534/1178036/chevron-dan-lahirnya-master-plan-riau-2020>
- <https://www.halloriau.com/read-pendidikan-122407-2019-11-27-majukan-dunia-pendidikan-di-riau-pt-rapp-serahkan-beasiswa-bagi-pelajar-dan-mahasiswa.html>
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi.* Jakarta, Aksara Baru: 1972:80.

- Laporan Keterangan Pertanggungjawab Kepala Daerah Provinsi Riau, 2019
- Nugroho Riant, 2014 Kebijakan Sosial Untuk Negara Berkembang. Jakarta Pustaka Pelajar
- Pasalong Harbani 2014 Teori Admubustrasi publik bandung alfabeta
- Sudianto 2016, Komunikasi Politik Raja Grafindo
- Sugiono 2011, Metode Penulisan Administrasi
- Suharto, Edi 2013 Kebijakan Sosial Sebagai Kebijaak Publik Alfabeta, Bandung
- Sutrianto, 2003. Mewujudkan Komitmen Politik lima tahun Saleh Diasit. Pekanbaru : Unri Press.
- Toha, Mifta. 2003 Birokrasi dan Politik Indonesia. Jakarta Raja Gravindo
- Winardi, J Manajemen Strategik Alfabeta 2016
- Yantos, Government Relation, Al-Fabeta 2016
- Riau pos 4 November 2011
- Kompas, 26 Mei 1993
- Winarko, Budi, 2005, Toeri dan Proses Kebijakan Publik, Alfa Beta, Bandung

BIODATA PENULIS

1. Afrinaldy Rustam, S.Ip., M.Si



Lahir di Rumbio, kabupaten Kampar, 20 April 1974 sudah beristri dengan nama Junitun, SE.

Lahir dari pasangan H Rustam Effendy dan Almarhumah, Hj Mithiar Jalil, S.Pd memiliki enam saudara. Sebagai anak tertua dikeluarga maka afrinaldy Rustam menjadi contoh dan teladan bagi adik-adiknya.

Adik kedua, Dr Bambang Rianto Rustam, Pengawai Bank Riau Kepri- Syariah.

Adik Ketiga, Masrizal Rustam yang berprofesi mengusaha kecil dan menengah.

Adik Empat, Eva Susanti, AMK Kebidanan. Bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Di Pusat kesehatan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir, Pemerintah Kota Pekanbaru .

Adik Kelima, Doktor Musfardi Rustam, SKM, Magister Kesehatan Lingkungan yang bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Keenam, Marta Hasanah Rustam. SH, MH profesi ibu rumah tangga dan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Afrinaldy Rustam menyelesaikan pendidikan S1 di FISIP HI UNRI, tamat tahun 1998. kemudian melanjutkan Pendidikan

Magister di Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung dengan Konsentrasi Administrasi Publik tamat tahun 2004. Saat ini tengah menjajaki beberapa perguruan tinggi terkemuka di Indonesia untuk melanjutkan program doktor. Buku teranyar tahun 2020 berjudul **“MEMBEDAH KEBIJAKAN VISI GUBERNUR RIAU”**.

Adapun, buku buku yang telah diterbit sebagai berikut : pertama, Birokrasi, potret kerajaan Riau Lingga dan Kerajaan Siak.

Kedua, Pelayanan Publik, studi Mal Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru.

Ketiga, Etika Pelayanan Aparatur Sipil Negara.

Keempat, Pemekaran Daerah, studi banding antara Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantang Singingi.

2. Sudianto, S.Sos., M.I.Kom



Lahir di Sungai Upih, Pulau Penyalai, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, 30 Desember 1980.

Menyelesaikan program S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU tahun 2005

Menyelesaikan Magister Komunikasi Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan spesialisasi Komunikasi Politik tahun 2008. Tahun 2019 melanjutkan pendidikan S3

atau program Doktor di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Ahmad Fauzi, S.Hi., MA



Lahir Teluk Latak, Kabupaten Bengkalis 23 Januari 1976. Menyelesaikan program S1 UIN SUSKA Pekanbaru, Tamat 2004. Menyelesaikan S2 di Pasca Sarjana UIN SUSKA Pekanbaru Tamat Tahun 2009.

Jabatan yang diemban adalah Ketua forum Dosen K2 UIN Suska Riau dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Agama, di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau.

RIAU NEGERI PARA PENDAHULU

Bagi penulis kalimat diatas mengandung maksud bahwa provinsi ini terwujud atas jasa para penggagas, pendiri dan direalisasikan semuanya oleh pemimpin yang memimpin dalam waktu tertentu dan telah diatur dalam Undang-Undang untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Pasca Otonomi Daerah pada 1 Januari 2000, maka Provinsi Riau berkesempatan mengurus diri sendiri oleh pemimpin yang pilih sendiri. Muncul nama Saleh Jasid dengan sebutan populer SD.

Mantan Bupati Kampar Ini berhasil menorehkan rasa percaya diri anak negeri bahwa mereka mampu memimpin dan berbuat untuk kejayaan Negeri yang bersinggungan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia. Pak Saleh bersama Konsosium Town Land dari Hongkong bersama PT. CPI berhasil membuat Visi Riau membumi dan membahana seketika itu.

Buktinya berduyun-duyun orang hebat datang ke Riau mulai dari Bimasakti dan Hendrokar-tiko hingga Mudaberlia melanjutkan studi Ke Malaysia, Inggris dan Negara Sekadianfia yang lebih maju peradabannya. Upaya ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan agar Riau sejajar dengan Negeri-Negeri maju yang ada di dunia ini.

Zaman Rusli Zainal dengan nama populer RZ muncul istilah memberantas kemiskinan dan kebodohan dengan memuka isolasi daerah, kata RZ sangat intens dan dekat dengan dunia melayu Islam seketika itu. Apalagi dengan, walikota malaka Datuk Muhammad Rustam, kepusat RZ berhasil membawa Riau menjadi tuan rumah PON tahun 2014 yang membuat rasa percaya diri semakin tinggi bahwa bisa semakin dikenal secara nasional.

Selanjutnya Anas Makmun anak daerah mampu berkiprah di Level Provinsi tapi Annas tidak lama memimpin lalu diganti dengan wakilnya yakni Arsyad Juliandi Rahman . Arsyad Juliandi Rahman yang menjadikan Riau Tanah Melayu.

Berbekal dengan menjadi orang No 1 dan kenyang dengan Kadin wilayah Riau dan anggota DPR RI maka Andi Rahman menancapkan Visi dan Misi yang cemerlang. Visi itu ada yang berhasil dan ada yang gagal, gagal menang di PLKUBRI ketika itu Andi lebih Memilih ke DPRRI dan posisinya digantikan Wan Tamrin Hasim.

Saat Wan Tamrin menjadi Orang No 1 di Riau, mantan Bupati Rokan Hilir ini terobsesi untuk mendukung transisi kepemimpinan Gubernur Baru dengan meninggalkan hasil Pembangunan Yakni Jembatan Siak IV yang berda di Jl. Sudirman Ujung dan Flay Over yang dibuat di SKA maupun pembangunan di sector yang lain.

Selanjutnya terjun kepemimpinan Riau dipimpin oleh H. Syamsuar M.Si dengan wakil Edi Muhammad Natar yang dilantik oleh Jokowi 20 Februari 2018 sekarang sudah 2 tahun menjabat sebagai orang no 1 di Riau semoga diakhir kepempinannya meninggalkan karya bagi Masyarakat Riau.

ISBN 978-602-6302-81-6



9 786026 302816